

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 TERHADAP SEKOLAH  
DASAR DI KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**M.IQBAL**

**NPM : 167310550**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi

Yang penuh dengan kesederhanaan serta berlimpah kebanggaan

Yang aku persembahkan kepada diriku

Dimasa lalu yang terus berjuang demi menyelesaikan

Karya ilmiah ini, dan sebagai tanda bakti kepada negeri.

Serta ucapan terima kasih kepada الله

Yang memberi kaki yang tak lelah berjan, tangan yang tak lelah menulis,

Serta tubuh yang kuat menopang, dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.

Terkhusus untuk Ayahanda **Delfius** serta ibunda **Yulita** yang tercinta.

Terimakasih atas semua yang telah diberikan,

Yang tak pernah berhenti hingga detik ini.

Dan teruntuk kamu yang hingga kini masih bersama dan telah banyak berjasa,

Baik waktu, pikiran. Serta motivasi yang berharga.

Kepada mereka yang tersebut, semoga الله mencatatnya sebagai amal baik,

Dan medapat balasan olehnya.

Aamiin..

***SKRIPSI YANG BAIK, ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI***

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)”**

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf. S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak Rijalul Fikri S.Sos., M.IP Selaku dosen penelaah yang telah

memberikan fondasi berfikir dalam pembuatan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras, doa restu, waktu serta kesabaran yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Fadia Rahma Salsabilla, atas waktu dan kesabarannya menemani dari awal pembuatan Skripsi ini

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan ataupun dari materi, maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

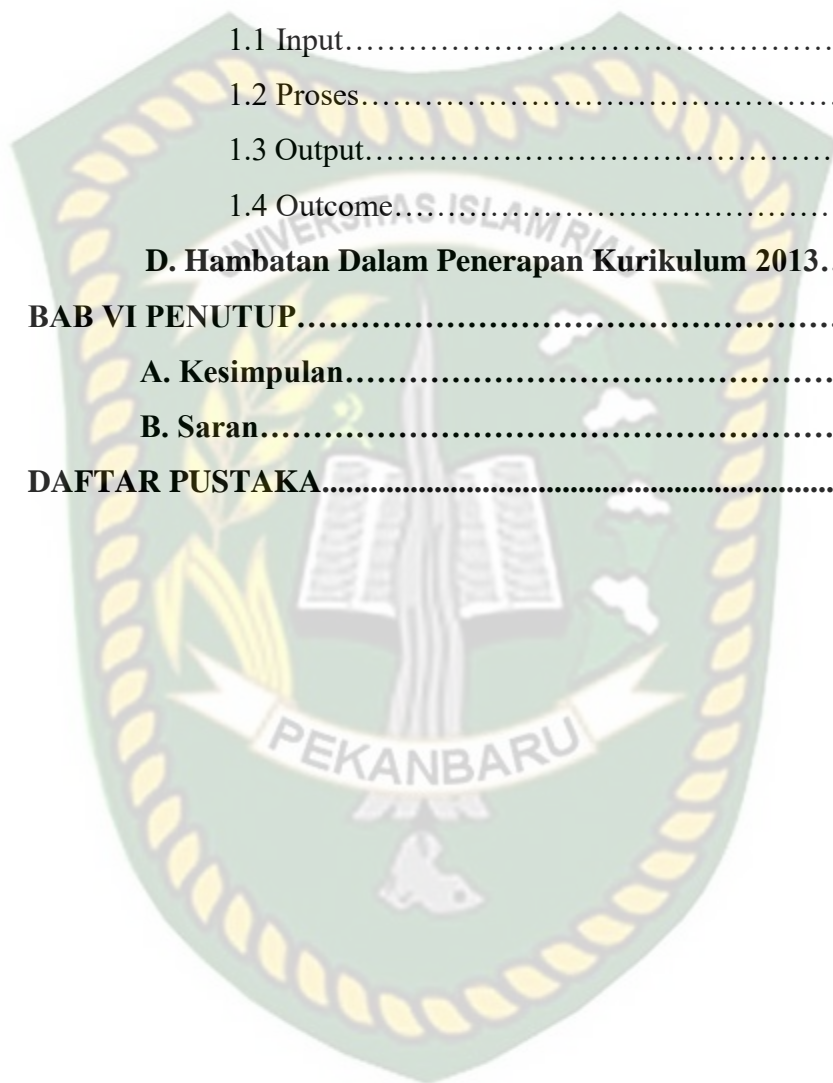
M.Iqbal

## DAFTAR ISI

LAMPIRAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.1 Tujuam Penelitain.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.2 Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II KONSEP DAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
<b>A. Teori Berfikir.....</b>	<b>13</b>
1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
1.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	14
1.3 Konsep Pemerintah Daerah.....	17
1.4 Konsep Otonomi Daerah.....	19
1.5 Konsep Kebijakan.....	20
1.6 Konsep Kebijakan Publik.....	21
1.7 Konsep Kurikulum 2013.....	23
1.8 Implementasi Penerapan Kurikulum 2013.....	24
1.9 Teori Pendidikan Demokratis dan humanis.....	25
1.10 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	28
1.10.1 Defenisi Evaluasi Kebijakan.....	28
1.10.2 Model Evaluasi Kebijakan.....	31
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>33</b>

C. Kerangka Berfikir.....	34
D. Konsep Operasional.....	35
E. Operasional Variable.....	37
<b>BAB III TEKNIK PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Metode Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Informan dan Key Informan.....	40
E. Teknik Penarikan Sampael.....	41
F. Jenis Sumber Data.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Waktu Penelitian.....	44
<b>BAB IV LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Kota Rengat.....	46
1.1 Sejarah Singkat Kota Rengat.....	46
1.2 Luas dan Letak Wilayah Kecamatan Rengat.....	47
B. Gambaran Instansi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.....	49
C. Gambaran Sekolah Yang Diteliti.....	51
1.1 Sekolah Dasar Negri 015.....	52
1.2 Sekolah Dasar Negri 019.....	52
1.3 Sekolah Dasar Negri 007.....	53
1.4 Sekolah Dasar Negri 001.....	53
1.5 Sekolah Dasar Negri 013.....	54
1.6 Sekolah Dasar Negri 002.....	54
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Indentitas Informan.....	56
B. Evaluasi Berdsakan Hasil Wawancara Terhadap Kebijakan Kurikulum 2013.....	56
1.1 Input.....	57

1.2 Proses.....	62
1.3 Output.....	69
1.4 Outcome.....	71
<b>C. Evaluasi Berdasarkan Hasil Observasi Terhadap Kurikulum</b>	
<b>2013.....</b>	<b>75</b>
1.1 Input.....	75
1.2 Proses.....	75
1.3 Output.....	76
1.4 Outcome.....	76
<b>D. Hambatan Dalam Penerapan Kurikulum 2013.....</b>	<b>77</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Hlm</b>
1.1	Penyempurnaan Pola Fikir Kurikulum 2013.....	5
1.2	Data Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hulu.....	9
1.3	Anak Berhadapan Hukum.....	10
1.4	Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn.....	31
1.5	Informan.....	33
1.6	Waktu Penelitian.....	36
1.7	Kelurahan dan Desa.....	42
1.8	Jarak Kelurahan/Desa Dengan Kantor Camat dan Kantor Bupati.	43
1.9	Jumlah Populasi.....	44
1.10	Sekolah Dasar Negeri 015.....	45
2.1	Sekolah Dasar Negeri 019.....	46
2.2	Sekolah Dasar Negeri 007.....	46
2.3	Sekolah Dasar Negeri 001.....	47
2.4	Sekolah Dasar Negeri 013.....	47
2.5	Sekolah Dasar Negeri 002.....	48
2.6	Informan.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
1.1	Grafik Anak Berhadapan Hukum.....	10
1.2	Kerangka Pikiran tentang Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu	25



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Iqbal  
NPM : 167310550  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul UP : Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian komprehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2021



M.iqbal

# EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 TERHADAP SEKOLAH DASAR DI KECAMTAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**ABSTRAK**  
**M.IQBAL**

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”, penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fenomena yang ditemukan dilapangan, seperti tingkat anak berhadapan hukum yang masih tinggi, dan juga hasil PISA indonesia yang dalam tiga penilaian masih dibawah rata-rata.

Sebagai janji Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 , bahwa negara akan memberikan pendidikan yang layak dan bermutu demi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang saat ini dapat dilihat pada salah satu intrumen yang digukan demi mencapai tujuan tersebut, yaitu kurikulum 2013 yang digunakan saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi instrumen yang digunakan, dengan menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Nurcholis, yang dalam evaluasi ini berfokus pada empat point utama, yaitu *Input, Proses, Output, Outcome*. Adapun narasumber yang berperan dalam penelitian ini ialah kepala sekolah dari dua sekolah akreditasi A dan satu kepala sekolah akreditasi B. Untuk memberikan pembandingan, dipilih juga tiga kepala sekolah yang berasal dari sekolah yang berbeda daerah dengan perbedaan tingkat teknologi, kebiasaan, serta pemerataan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan jika dilihat secara garis besar, bahwa kurikulum 2013 yang ada saat ini sudah berjalan, namun tetap tidak terlepas dari permasalahan yang menyertainya, yang jika dilihat dari dua daerah yang berda, memiliki masalah yang berbeda pula, dengan demikian masih banyak yang perlu dibenahi untuk menyempurnakan kurikulum yang ada saat ini.

**Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penerapan Kurikulum 2013**

**EVALUATION OF 2013 CURRICULUM POLICIES ON PRIMARY SCHOOLS  
IN RENGAT DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY**

**ABSTRACT  
M.IQBAL**

*This thesis entitled "Evaluation of 2013 Curriculum Policies on Primary Schools in Rengat District, Indragiri Hulu Regency", this research was conducted based on phenomena found in the field, such as the high level of children dealing with the law, and also the results of Indonesian PISA which in three assessments were still below average*

*As the promise of the Republic of Indonesia in the 1945 Constitution, that the state will provide decent and quality education to educate the nation's life, which can now be seen in one of the instruments used to achieve this goal, namely the 2013 curriculum that is currently used.*

*This study aims to evaluate the instruments used, using the evaluation theory proposed by Nurcholis, which in this evaluation focuses on four main points, namely Input, Process, Output, and Outcome. The resource persons who played a role in this study were the principal of two accredited A schools and one accredited B school principal. To provide a comparison, three school principals who came from different schools were also selected with different levels of technology, habits, and equal distribution of education.*

*The results of the study show that in broad terms, that the current 2013 curriculum is already running, but it is still inseparable from the accompanying problems, which, when viewed from two different regions, have different problems, thus there is still much that needs to be addressed. to perfect the current curriculum.*

***Keywords: Policy Evaluation, 2013 Curriculum Implementation***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang telah diamanatkan dan telah tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945, pada alenia ke empat.

Demi tercapainya tujuan negara tersebut, maka diperlukan penataan dan juga pelaksanaan yang baik pula. Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara menjamin setiap warga negara mendapat pendidikan yang berkualitas bahkan diwilayah yang terkategori dalam wilayah Tertinggal.

Dalam pasal 31 (ayat 3) Undang-undang Dasar mengamanatkan agar negara mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jaminan ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1)

“ Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Dalam melaksanakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yang berupa kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah, pada penerapannya tidak lagi hanya berbentuk paksaan dan juga mengikat, namu juga berbentuk lembut yang berupa wacana regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah, yang nantinya akan menjadi sebuah kebenaran ( Rijalul Fikri: 2017), yang dipercayai oleh masyarakat. Dan negara bertujuan dalam mengarahkan warganya secara lembut menggunakan regulasi yang nantinya diterapkan dan menjadi dasar dari konstruksi terhadap masyarakat yang berujung pada pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pembuat regulasi.

Salah satu kebijakan yang terbentuk dalam proses pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, sejatinya dalam Undang-undang tersebut dalam BAB III Pasal 4 di jelaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu, pada sistem pendidikannya menggunakan prinsip pendidikan yang Demokratis dan Humanis, yang senyatanya sama dengan apa yang digunakan oleh Negara yang termasuk dengan kualitas pendidikannya yang terbaik di dunia, yaitu negara Finlandia.( B. Sinaga:2012)

Demi tercapainya tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penunjang dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, sehingga

dibuatkanlah kurikulum yang digunakan saat ini sebagai standar dalam pelaksanaan pendidikan yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Standar yang digunakan dalam pendidikan kita berdasarkan pada prinsip pendidikan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam hal ini adalah demokratis dan humanis. Pendidikan yang demokratis adalah pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog, dan keikutsertaan seluruh pihak (Barber:2001).

Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Dalam sekolah demokratis, peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah, seperti penentuan pembelajaran, memilih apa yang ingin dipelajari menurut rangkaian waktu dan kepemimpinan (Crippen:2005).

Konsep teori belajar Humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, Artur W. Coumb: (1949) Memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tatkala bagi seseorang ada artinya, guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau dianggap tidak relevan. Dalam hal ini, prinsip pendidikan humanistik akan lebih cocok dengan paham konstruktivisme, yang dikenal sebagai teori pendidikan yang memuliakan manusia atas potensi yang dimiliki. ( B. Sinaga: 2012)

Berdasarkan pada prinsip pendidikan yang ada, maka terbentuklah standar pendidikan yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum 2013, Menurut Mulyasa (2014) kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan

karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Kurikulum yang telah dibentuk, merupakan turunan dari kebijakan mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun sebagai pelaksana Pendidikan di tingkat daerah ialah Dinas Pendidikan, yang pada penelitian ini ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri hulu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu:

1. Urusan Pemerintah terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
5. Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.
6. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan begitu, nantinya menjadi pendoman kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. (E. Mulyasa, 2013), dengan adanya dasar karakter dalam

kurikulum 2013, diharapkan agar siswa di Indonesia memiliki karakter yang kuat, dan akan menjadi modal besar untuk bersaing di dunia global. Hal ini dimungkinkan, jika implementasi kurikulum 2013 betul-betul dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter.

Dengan melihat fenomena sebelum adanya kurikulum tersebut, seperti kekerasan yang dilakukan oleh anak, kenakalan remaja, attitude siswa yang tidak baik, baik dalam hal hubungan siswa kepada orang tua, siswa kepada guru, dan siswa kepada sesama siswa, hingga narkoba, dan tindak pidana lain, Kurikulum 2013 dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini.

Penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain adalah kejadian yang menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah serta rapuhnya fondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa (Mulyasa, 2013:). Selain itu, penyebab perlunya mengembangkan kurikulum 2013 adalah beberapa hasil dari riset internasional yang dilakukan oleh Global Institute dan Programme for International Student Assessment (PISA) merujuk pada suatu simpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013:). Sehingga pemerintah berkesimpulan bahwa karakter bangsa adalah yang paling pertama harus dibenahi.

Sebelum terjadi perubahan kurikulum pada tahun 2013, Indonesia menggunakan kurikulum KTSP 2006, yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan yang di gunakan saat ini, hal yang paling membekas dari kurikulum KTSP

2006 adalah penggunaan teori Tabularasa yang melihat siswa sebagai kertas putih, yang nantinya akan di bentuk oleh tenaga pendidik, (B. Sinaga:2012).

Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah (Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah): Tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Demi tercapainya tujuan dari kebijakan ini, maka perlu adanya sarana pendukung, seperti buku paket, teknologi penunjang belajar seperti komputer, jaringan internet, bahkan pelatihan untuk tenaga pendidik.

**Tabel 1.1** Penyempurnaan Pola Fikir Kurikulum 2013

NO	KBK 2004	KTSP 2006	KURIKULUM 2013
1	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2	Standar isi dirumuskan berdasarkan tujuanmata pelajaran (standar kompetensi lulusan mata pelajaran) yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran
3	Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan.	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan.
4	Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
5	Mata pelajaran lepas satu dengan yang, seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah	Semua mata pelajaran diikat kompetensi inti (tiap kelas)	Semua mata pelajaran diikat kompetensi inti (tiap kelas)

Sumber: Materi Uji Publik Kurikulum 2013

Dengan penggunaan teori konstruktivisme, diharapkan dengan peran guru sebagai fasilitator yang memberikan arahan terhadap pembentukan karakter yang

baik, siswa dapat mengkonstruksi dirinya sendiri agar memiliki karakter yang baik, dan diharapkan dapat melekat dan tidak mudah hilang oleh pengaruh luar.

Penggunaan prinsip pendidikan humanis yang juga diiringi dengan teori Konstruktivisme, bertujuan untuk menghilangkan penggunaan teori pendidikan yang lama, yaitu konsep teori Tabularasa, yang dulu digunakan oleh hampir seluruh tenaga pendidik dan mengarah pada behavioristik.(B. Sinaga:2012). Teori belajar behavioristik sendiri merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon (Nahar, 2016).

Dengan membandingkan prinsip humanis yang diiringin dengan teori belajar Konstruktivisme dan teori belajar Behavioristik, terlihat bahwa kedua teori sangat bertolak belakang, dimana Konstruktivisme menekankan pada pemahaman siswa dalam mengatasi dan mencari solusi sebuah masalah yang kemudian diterapkan dalam praktek sosial yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan siswa dimasa depan. Sedangkan teori belajar behavioristik berfokus pada hubungan guru (stimulus) dengan siswa (respon), (Slavin, 2000:143) yang tidak mempedulikan proses terjadinya pengolahan pemahaman oleh siswa (karena tidak bisa diukur) dan lebih mementingkan pada hasil dari stimulus yang diberikan oleh pendidik..

Melihat perpindahan dari teori Behavioristik yang dianggap tidak cocok dengan keberagaman siswa, yang terkadang mengakibatkan penolakan oleh siswa itu sendiri, ke teori Konstruktivisme yang berfokus pada siswa untuk mengubah dirinya sendiri dengan bantuan fasilitator. Sehingga perpindahan ini diharapkan dapat mengubah karakter siswa ke arah yang lebih baik.

Harapan yang dibawa oleh kurikulum saat ini sangat besar, dengan tujuan merubah karakter anak bangsa menjadi lebih baik, dengan harapan kejayaan indonesia dipimpin oleh orang orang yang memiliki karakter yang bagus.

Berdasarkan standarisasi pendidikan yang telah diciptakan oleh pemerintah dengan semua yang terkandung didalamnya, seberapa besarkah pengaruh standarisasi tersebut terhadap perubahan karakter siswa kearah yang lebih baik.

**Tabel 1.2** Data Sekolah Dasar Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Sekolah Dasar		Akreditasi			
		N	S	A	B	C	None
1	Peranap	24	3	3	19	5	0
2	Pasir Penyu	19	3	16	5	1	0
3	Kelayang	23	0	3	13	4	3
4	Seberida	24	3	11	14	1	1
5	Rengat	30	5	20	15	0	0
6	Rengat Barat	29	2	12	16	3	0
7	Lirik	14	2	8	6	1	1
8	Batang Gansal	17	3	3	11	4	2
9	Batang Cenaku	27	1	3	15	10	0
10	Batang Peranap	11	0	1	7	3	0
11	Lubuk Batu Jaya	13	0	6	6	0	1
12	Sei Lala	13	0	2	8	1	2
13	Rakit Kulim	29	0	4	15	10	0
14	Kuala Cenaku	12	1	2	9	1	1
	<b>Jumlah</b>	286	23	94	158	44	12

Sumber: [dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/090400](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/090400)

Berdasarkan pada instruksi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu agar setiap sekolah dasar menggunakan kurikulum 2013, yang mana instruksi ini dimulai sejak tahun 2017 dan diinstruksikan untuk berkelanjutan. Berdasarkan tabel data sekolah dasar di Indragiri Hulu, penelitian ini akan berfokus pada kecamatan Rengat sebagai ibu kota Kabupaten, dan sebagai kecamatan dengan pendidikan sekolah dasar berakreditasi A terbanyak, dan dianggap mumpuni sebagai daerah dengan pendidikan yang merata untuk tingkat sekolah dasar.

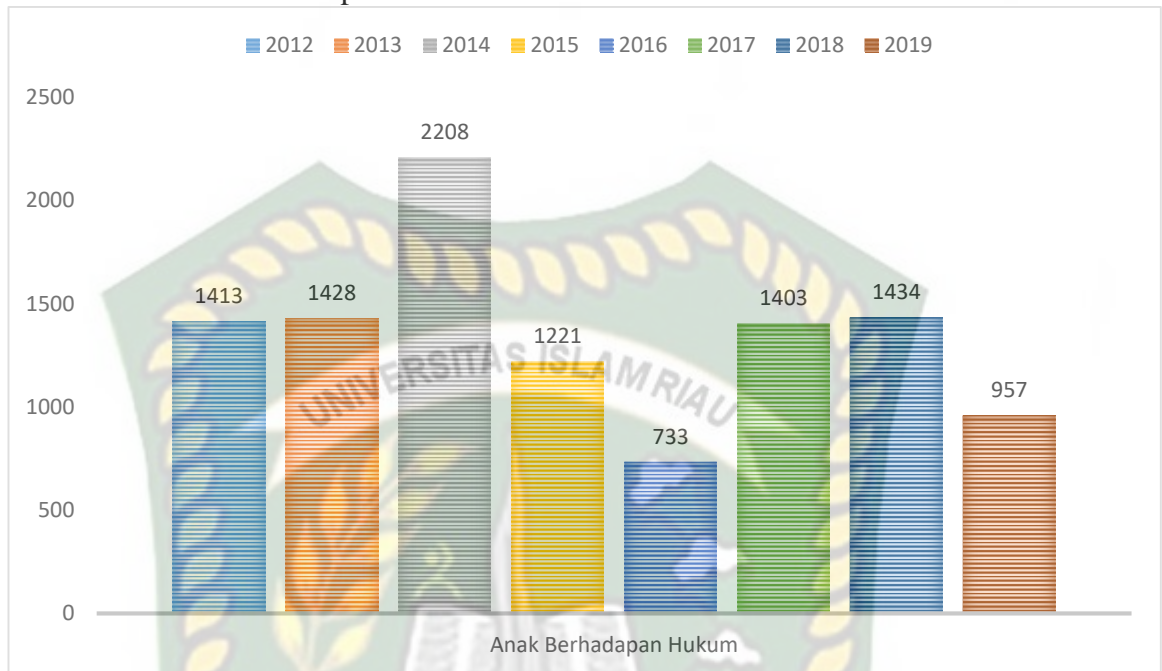
Melihat betapa seriusnya pemerintah dalam penekanan perbaikan karakter anak indonesia terutama bagi siswa sekolah, tidak diiringi dengan hasil yang memuaskan, dengan ditemukannya fenomena pertama oleh penulis, dapat kita lihat pada tabel berikut yang terhadap data Anak Berhadapan Hukum (ABH).

**Tabel 1.3** Anak Berhadapan Hukum

NO	TAHUN	KASUS ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)
1	2011	695
2	2012	1.413
3	2013	1.428
4	2014	2.208
5	2015	1.221
6	2016	733
7	2017	1.403
8	2018	1.434
9	2019	957

Sumber: kpai.go.id

**Grafik 1.1** Anak Berhadapan Hukum



Pengakuan KPAI dalam Konferensi pers dikantor KPAI Jakarta Pusat ( 8/

1/ 2019), bahwa kasus anak berhadapan hokum (ABH) masih menjadi angka tertinggi untuk kasus yang di paparkan oleh KPAI, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tinggi.

Selama masa penerapan kurikulum 2013 dalam tujuannya merubah karakter anak bangsa menjadi lebih baik melalui pendidikan , yang kini sudah berusia 6 tahun, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi selama masa berlaku itu.

Pertama mengenai data anak berhadapan hukum yang masing tinggi, tercatat mencapai jumlah paling banyak pada tahun 2014, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016, namun mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2017 dan 2018.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu ialah penganiayaan Kepala Sekolah oleh seorang siswa yang dikarenakan tidak terima

orang tuanya di panggil ke sekolah, kejadian tersebut terjadi di tahun 2019. Kasus kedua yang penulis temukan, ialah kasus pornografi yang dilakukan oleh siswa SMP bersama teman Prianya yang terjadi pada tahun 2018.

Fenomena Kedua ialah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis sendiri terhadap seorang guru di kabupaten Indragiri Hulu, bahwa masih ada sebagian guru yang masih menggunakan prinsip tabularasa dalam dunia pendidikan, walau amanat kurikulum 2013 ialah bersifat konstruktivisme.

Fenomena ketiga ialah laporan dari PISA tahun 2018, Indonesia mendapatkan skor, dengan nilai membaca 371 (<487) Matematika 379 (<487) dan Sains 389 (<489)

Dengan melihat fenomene yang terjadi, muncul hipotesis masalah, yaitu apakah implementasi kurikulum 2013 sudah dilaksanakan dengan baik oleh tiap tiap sekolah, dan sudah di jalankan dengan benar oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya, sehingga dirasa perlu adanya evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum 2013.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas mengenai kebijakan Pendidikan yang berupa kurikulum 2013 yang di terapkan kepada siswa sekolah, yang dalam penelitian ini berfokus pada siswa sekolah dasar, maka dapat

disimpulkan **“Bagaimana Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap Sekolah Dasar Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu”**.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a) Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah tentang Pendidikan, yaitu kurikulum 2013 terhadap sekolah dasar.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerapan kurikulum 2013 terhadap sekolah dasar di kecamatan Rengat

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

- a) Secara teoritis: Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
- b) Secara praktis: Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bidang pendidikan dimasa yang akan datang.
- c) Secara kontribusi: Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya peningkatan Kualitas Pendidikan.

## BAB II

### KONSEP DAN TEORI

#### A. KONSEP PUSTAKA

##### 1.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan sebagai salah Satu cabang Studi Ilmu Sosial memiliki banyak arti, sebagaimana ahli memberikan pengertian dalam arti luas yaitu menurut Montesquieu pemerintahan adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan trias potical, baik itu legislatif (yang membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Sedangkan menurut Syafie, (2011;23) Ilmu Pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), Kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan ( baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahan ) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya secara baik dan benar.

Pemerintahan adalah Suatu ilmu dan Seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan. Yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan Kharismatik menjalankan roda Pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin Ilmu Pengetahuan adalah Karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan sistematis serta spesifik/ khas (syafie,2011;20).

Menurut Labolo (2007: 24) Pemerintahan Sesungguhnya merupakan Upaya Mengelola Kehidupan Bersama secara Baik dan Benar guna mencapai Tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah Aspek penting seperti Kegiatan (dinamika), Struktur Fungsional, maupun Tugas dan Kewenangan.

Sedangkan Menurut Iver dalam Syaf'ie (2005:22-23) Mengatakan Pemerintahan itu adalah Suatu Organisasi dari Orang-orang yang mempunyai Kekuasaan, jadi Ilmu Pemerintahan adalah Sebagai Suatu Ilmu tentang Bagaimana manusia adalah Perintah. Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan Pengurusan (eksekutif), Kepemimpinan dan Koordinasi secara Baik dan Benar.

## **1.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan**

Menurut ndraha (2003:5) pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintahkan jasa politik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintahkan berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. Pada dasarnya proses-proses itu kumulatif proses demand-supply, produksi konsumsi, pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi feedback.

Sehingga Pemerintah ini memiliki tugas dan fungsi untuk sentiasa menjalankan tugas-tugas pokok agar dapat menjalankan pelayanan untuk dapat

memisahkan keadilan, dan kemandirian serta dapat menciptakan pembangunan dan kemakmuran untuk masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UDD 1945 maupun lembaga lembaga yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden/Eksekutif.

Menurut Awang dan Wijawa (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menciptakan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat-istiadat, insituisi dan hukum dalam sebuah negara, pemerintah ialah organ yang mengurus layanan public untuk Warga Negara Asing yang berada pada wilayah indonesia yang hak untuk bertempat tinggal di negara Indonesia.

Pemerintahan adalah sebuah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan tuntutan rakyat, Ndraha (2003:146). Secara umum pembentukan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut

1. Dari sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka
2. Dari sistem pemerintahan birokratis-partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan
3. Dari sistem pemerintah hyper sentralistik ke sistem pemerintah desentralistik
4. Dari pertanggung jawaban vertical ke penanggung jawaban horizontal
5. Dari paternalisme despotic ke control sosial
6. Dari suksesti (penggantian jabatan) berdasarkan dinasti atau anugerah ke recruitment dan selection
7. Dari lomptan ke tahap teknologi
8. Dari manajemen proyek ke manajemen fungsi dan tugas
9. Dari budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik

10. Dari kita menjadi saya
11. Unit kerja pemerintahan yang paling bawah di perlukan sebagai embel-embel, pelengkap penderita, diabaikan.
12. Dari pemberian pemberdayaan
13. Dari sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aspirasi rakyat kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bahas birokrasi
14. Dari menolong ke dialog (Ndraha 2003: 149)

Sedangkan menurut Ndraha (dalam wasistiono dan Rahyunir, 2003:6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Erlina (2005;2) Pemerintahan adalah Organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan Kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti Luas merupakan Suatu yang lebih besar dari pada Suatu Kementrian yang diberi Tanggung Jawab memelihara Perdamaian dan Keamanan Negara .

Sedangkan Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dalam Pradigma lama memiliki Objek Material Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, Namun Dalam Pradigma baru Pemerintahan dipandang memiliki Objek materialnya masyarakat, sehingga Pemerintahan dimaknai sebagai Suatu Proses menata Kelola Kehidupan Masyarakat dalam suatu Pemerintahan /Negara .

Menurut Maulidiah (2014;4) Pemerintahan memiliki Tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Pemerintah, Ketiga fungsi hakiki Pemerintah tersebut, yakni memberikan Pelayanan Kepada masyarakat

(service),memberdayakan segala Potensi yang dimiliki (empowerment),serta melaksanakan Pembangunan (development)

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah,2014;4) Tugas Pokok Pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Utrecht berpendapat, sebagai mana di kutip dari Lubi, (1995,23) bahwa istilah pemerintahan itu meliputi (3) pengertian yang berbeda, Yaitu:

1. Pemerintah sebagai gabungan seluruh bada kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi termasuk seluruh bada kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, yakni badan yang bertugas membuat peraturan perundangan-undangan, badan yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan dan badan yang bertugas mengawasi bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan. Dengan demikian badan-badan tersebut meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif
2. Pemerintah sebagai gabungan badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu Negara, misalnya raja, priseden, yang dipertuan agungkan.
3. Pemerintah dalam arti kepala Negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya, yang berarti organ eksekutif yang bisa disebut dengan dewan mentrei atau kabinet.

### **1.3 Konsep Pemerintah Daerah**

Sebagai sebuah Negara Republik Indonesia memiliki filsafat Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 kerangka kenegaraan dan sistem Pemerintah Republik Indonesia diatur. Negara Indonesia adalah Negara konsitusi yang menggunakan sistem demokrasi dan bentuk Negara kesatuan. Untuk menyelenggarakan Negara Indonesia, dibentuk lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. Legaslatif.

2. Eksekutif.
3. Yudikatif.
4. Pemeriksa Keuangan.

Namun melihat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan letak geografi luas dengan kondisi sosial budaya yang beragam. UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan (Nurcolis:2005).

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Dalam pemerintahan daerah, terdapat tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Dalam urusan pemerintahan konkuren, terbagi menjadi dua urusan lain, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, dalam penelitian ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar yang berupa bidang pendidikan

Tjahja Supriatna (dalam Hanif:2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a) Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara

- b) Pemerintah daerah diatur oleh hukum.
- c) Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
- d) Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.
- e) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

#### 1.4 Konsep Otonomi Daerah

Menurut Djohan, (1990, 52) Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah.

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. (Nadir, 2013).

Menurut Nurcholis (2007,30) Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan

mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

### 1.5 Konsep Kebijakan

Menurut Carl J Federick, yang dikutip dari Leo Agustino ( 2008:7 ), Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang atau kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sehingga kegiatan yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Kebijakan adalah Sekumpulan Keputusan yang diambil oleh Seorang Pelaku atau Kelompok Politik,dalam usaha memelihara tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada Prinsipnya,Pihak yang membuat Kebijakan-kebijakan itu mempunyai Kekuasaan untuk melaksanakan.(Miriam Budiarjo 2008 ;20)

Friendrich (dalam Wahab 2004;3)Kebijakan adalah Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang kelompok atau Pemerintah dalam Lingkungan tertentu sehubungan dengan Adanya Hambatan-hambatan tertentu seraya mencari Peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Solichin Abdul Wahab (2008:40) memberikan pedoman tentang kebijakan, yaitu:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintahan.
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakn ( policy term ) mungkin digunakan secara luas seperti pada “ kebijakn luar negri Indonesia”, “Kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokrasi dan regulasi

Suharno (2009:11), bahwa Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan , undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand desigh.

### **1.6 Konsep Kebijakan Publik**

Menurut Pressman dan Widavsky yang mana dikutip oleh Budi Winarno (2002 : 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Menurut Robert Eyestone yang dikutip oleh Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya.”

Menurut Woll yang di kutip oleh Tangkilisan ( 2003:2 ) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan

masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagai mana dikutip Islamy (2009:19) mendefenisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever gouverment choose to do or not to do*” . Dengan begitu, dari defenisi tentang kebijakan publik oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupa aturan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, dengan memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Menurut Dye dalam (Leo Agustino,2008;7) Mengemukakan bahwa, Kebijakan Publik adalah apa yang dipilih oleh Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friendrich dalam (Leo Agustino 2008;7)mengartikan Kebijakan sebagai serangkaian Tindakan atau Kegiatan yang diusulkan oleh Seseorang, atau kelompok atau Pemerintah dalam Suatu lingkungan tertentu.

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari progam – progam pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk progam-progam dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

Dapat dsimpulkan bahwa kebijakn publik adalah serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pembuat peratauran atau pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sdang terjadi di masyarakat

## 1.7 Konsep Kurikulum 2013

Menurut Murray Print dalam Wina Sanjaya (2008) mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi: (1) *Planned learning experiences*; (2) *offered within an educational institution/program*; (3) *represented as document*; and (4) *included experiences resulting from implementing that document*, bahwa kurikulum meliputi (1) pengalaman belajar yang direncanakan; (2) tawaran program institusi / program pendidikan; (3) direpresentasikan sebagai dokumen; dan (4) pengalaman yang dihasilkan dari pelaksanaan dokumen.

Kebijakan tentang pembelajaran kurikulum 2013 ini tercantum dalam dokumen regulasi Permendikbud No. 81A tahun 2013 yang diperbaharui dengan Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang Pembelajaran. Berorientasi kepada usaha-usaha penyiapan lahirnya Generasi emas Indonesia 2045 yang didambakan. Generasi emasi Indonesia yang memiliki kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasi oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

Kompetensi-kompetensi yang tercantum dalam Permendikbud No. 54 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Dimensi Kualifikasi Kemampuan:

- **Sikap**  
Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

- **Pengetahuan**

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.

- **Keterampilan**

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

### 1.8 Implementasi Kurikulum 2013

Pengimplementasian kurikulum ini terdiri dari empat tahap:

1) Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (a) analisis kebutuhan; (b) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis; (c) menentukan disain kurikulum; dan (d) membuat rencana induk (master plan): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Selain itu (e) Kesiapan buku pegangan utama guru dan buku pegangan siswa, serta (f) pelatihan guru akan dimulai dari guru yang mengajar pada kelas-kelas yang menjadi pilot kurikulum 2013. Seperti kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Setelah mereka selesai dilatih, mereka akan langsung menjadi Training of trainer (TOT) bagi guru lainnya. Kesiapan administrasi dan tata kelola. Guru akan memiliki rapor sendiri dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula pembagian jam mengajarnya akan ikut ditata.

2) Tahap pengembangan meliputi langkah-langkah : (a) perumusan rasional atau dasar pemikiran; (b) perumusan visi, misi, dan tujuan; (c) penentuan struktur dan isi program; (d) pemilihan dan pengorganisasian materi; (e) pengorganisasian kegiatan pembelajaran; (f) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; dan g) penentuan cara mengukur hasil belajar.

3) Tahap implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah: (a) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (b) penjabaran materi; (c) penentuan strategi dan metode pembelajaran; (d) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; (e) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar; dan (f) setting lingkungan pembelajaran. 4). Tahap penilaian; terutama dilakukan untuk melihat sejauhmana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, produk (Rusman, 2009:21).

### **1.9 Teori Pendidikan Demokratis dan Humanis**

Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak, untuk mendapatkan pendidikan. Secara horizontal, pendidikan demokratis menuntut agar tiap anak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa ada pengecualian, dan tanpa ada pembeda diantara mereka, dan ini juga diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. Dan dalam pengertian vertikal, bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam menimba ilmu setinggi tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, demokratis ditunjukkan dengan pemusatan perhatian suatu usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya, (intelegensi, kesehatan, serta keadaan sosial), dikalangan taman siswa dianut sikap *Tutwuri Handayani*, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk berkembang menurut kodratnya. ( Hasbullah. 242:1999)

Prinsip dasar pendidikan dan pembelajaran yang demokratis adalah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensinya, karakternya, pengetahuannya, keterampilannya, dan kreativitasnya untuk mencapai cita-cita bersama bangsa ini. Pendidikan yang demokratis dalam pengertian luas hendaklah mampu memberdayakan semua kelompok (kelompok budaya, agama, organisasi, anak cacat, kelompok suku terasing, kelompok profesi, masyarakat desa tertinggal dan terpencil) tanpa batas-batas yang spesifik. Berdasarkan kelompok sasaran tersebut, dapat digambarkan bagaimana variasi pendidikan yang perlu diupayakan. Semua jenis kelompok ini harus dapat diberdayakan dan tidak ada yang disisihkan kalau ingin diciptakan pendidikan yang benar-benar demokratis. (B.Sinaga:2017). Dengan begitu, pendidikan demokratis haruslah mencakup seluruh kebutuhan dari tiap siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, agar tidak terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi di dunia pendidikan, yang dapat merusak pondasi pendidikan demokratis itu sendiri.

Konsep pendidikan demokratis yang dikutip oleh Muis said imam(2004) yang dikemukakan oleh Jhon Dewey ialah menanamkan disiplin, tapi bukan otoriter, ada beberapa indikator menurut Jhon Dewey, pendidikan demokratis berdasarkan prinsip disiplin ialah:

- Tidak ada paksaan dalam proses pendidikan
- Peningkatan minat siswa oleh guru melalui intimisasi yang disesuaikan dengan minat siswa
- Adanya suasana partisipatif di dalam kelas

Humanis berasal dari kata *humanus* yang merupakan kata sifat dari *homo* yang berarti manusia. Pendidikan humanis tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi dengan tiga prinsip yang dikemukakan oleh Mardiatmaja sebagaimana dikutip oleh T. Sarkim (1998), sebagai berikut:

- a. Dalam proses pendidikan, pengembangan hati dan pikiran harus berjalan secara bersamaan;
- b. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal;
- c. Dalam pendidikan harus ada kerjasama erat antara peserta didik dan pendidik, juga antara teori dan praktek.

Pembelajaran yang sejalan dengan ketiga prinsip di atas lebih cenderung menganut paham konstruktivisme (B.Sinaga:2012). Menurut Artur W Coumb, belajar terjadi apabila memiliki arti oleh siswa, sehingga guru tidak bisa memaksakan materi apa yang harus dipelajari oleh siswa (Rumini,Dkk:1993). Intinya, pendidikan humanis dapat dipahami sebagai model pendidikan yang memuliakan manusia atas potensipotensi kemanusiaan yang sudah ada dalam dirinya. Pada model pendidikan ini, manusia dipandang sebagai subyek yang otonom, sehingga pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan bukan pada pendidik.

Kondisi yang membuat siswa berada dalam keadaan terpaksa melakukan atau mempelajari suatu materi hanya akan menjadi ilmu sesaat, karena arti yang tidak begitu kuat bagi siswa sehingga yang dipelajari akan mudah hilang, dari pada ilmu atau materi yang memiliki arti kuat dalam diri murid tersebut.

Dari teori yang ada, dapat diturunkan indikator mengenai pendidikan yang humanis. Yaitu:

- Adanya hubungan antar teori yang dipelajari dengan praktek
- Adanya proses pengolahan oleh siswa terhadap suatu materi yang diajarka ( feedback siswa saat materi diberikan)
- Pemilihan materi yang memiliki *meaning* oleh siswa
- Proses pemberian *meaning* oleh guru

## 1.10 Konsep Evaluasi Kebijakan

### 1.10.1 Defenisi Evaluasi Kebijakan

Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily: 1983). Menurut Stufflebeam (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai “The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

Evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (*input*) untuk memaksimalkan keluaran (*output*), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau aktivitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat. (Achmad Hafidz Rifai, 2018)

Evaluasi menurut Kumano (2001) merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasoetion (1997) menyatakan

bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Menurut Abdullah (2014,4) Dalam bukunya manajemen dan evaluasi karyawan mengatakan bahwa evaluasi adalah penilaian terhadap sesuatu, jadi dengan mudahnya evaluasi itu harus dilengkapi dulu dengan objek yang dinilai.

Nugroho (2014:706) menjelaskan bahwa “evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari kinerja implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan”

Menurut Dunn dalam Nugroho (2014:712) menjelaskan bahwa:

“evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”\

Sementara James P. Lester dan Joseph Steward Jr (2000) dalam Nugroho (2014:714) menjelaskan bahwa :

“Evaluasi implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi evaluasi proses, berkenaan dengan proses implementasi, evaluasi dampak yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu”.

Agustino (2008:186) menyatakan bahwa “evaluasi kebijakan adalah rangkaian aktivitas fungsional yang berusaha untuk membuat penilaian melalui pendapat mengenai manfaat atau pengaruh atas kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan/atau telah dilaksanakan”.

Lester dan Stewart (2000:126) dalam Agustino (2008:185), menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang di inginkan.

Menurut Rossi & Freeman (Pasolong, 2010:60), menyatakan bahwa:

“Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh suatu program untuk dikaitkan dalam pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. Evaluasi, tidak saja berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru, peningkatan efektifitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggungjawabkan pihak yang mensponsori program tersebut”.

Menurut Soebarsono dalam bukunya mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui beberapa biayadan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan berkualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Dari penjelasan beberapa ahli mengenai evaluasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian serta membandingkan kebijakan yang telah berjalan dengan melihat apakah output

kebijakan tersebut, sesuai dengan yang telah direncanakan (input) yang nantinya akan menjadi landasan dalam pembuatan alternative-alternative yang akan dipilih dalam proses menjalankan kebijakan kedepannya.

### 1.10.2 Model Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn (Nugroho. 2014:712) membagi kriteria evaluasi menjadi 6 (enam) kriteria. *Pertama*, efektivitas, merupakan suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. *Kedua*, efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. *Ketiga*, kecukupan, merupakan sejauh mana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. *Keempat*, pemerataan yang mempertanyakan apakah distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik sudah merata sesuai dengan asas keadilan. *Kelima*, responsivitas, mencakup respon dari hasil kebijakan tersebut apakah sudah memuaskan kebutuhan atau nilai terhadap kelompok-kelompok tertentu. *Keenam*, ketepatan, merupakan sebuah ukuran apakah sebuah program atau kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, dan hasil yang dicapai benar-benar berguna sesuai yang direncanakan. Kriteria tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.4: Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn**

No	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya, Manfaat bersih, Rasio biaya manfaat

3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor hicks, Kriteria Rawls
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warganegara
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?	Program public harus merata dan efisien

Sumber (Nugroho. 2014. 172)

Edward A. Suchman melihat evaluasi dari sudut praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan suatu dampak.

Nurcholis (2007:277), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu :

- 1) *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
- 2) *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.

- 3) *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- 4) *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

## B. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut:

**Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Safri, 2016 (Skripsi)	Evaluasi Kegiatan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Di Kecamatan Rengat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penelitian</li> <li>• Metode Penelitian</li> <li>• Teknik Pengumpulan Data</li> <li>• Konsep Evaluasi</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Yang Digunakan</li> <li>• Hasil Penelitian</li> <li>• Fokus Penelitian</li> </ul>
2	Afdhalul Ihsan 2015 (Skripsi)	Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Wajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Penelitian</li> <li>• Teknik Pengumpulan Data</li> <li>• Konsep Evaluasi</li> <li>• Metode Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Yang Digunakan</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Hasil Penelitian</li> <li>• Fokus Penelitian</li> </ul>
3	V. Manly Lumba Tobing 2019 (Skripsi)	Pengaruh Evaluasi Proses Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan Lampung Timur Tahun 2018/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Yang Digunakan</li> <li>• Fokus Penelitian</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Metode Pengumpulan Data</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian</li> </ul>
4	Wiyata Dharma 2018 ( Jurnal)	Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kosep Evaluasi</li> <li>• Tipe Penelitian</li> <li>• Metode Penelitian</li> <li>• Metode Pengumpulan Data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Yang Digunakan</li> <li>• Fokus Penelitian</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> <li>• Hasil Penelitian</li> </ul>
5	Sri Budiani 2017 (Jurnal)	Evaluasi Iplementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Pelaksana Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Evaluasi</li> <li>• Metode Pengumpulan Data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Yang Digunakan</li> <li>• Loaksi Penelitian</li> <li>• Hasil Penelitian</li> </ul>

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

### C. KERANGKA BERFIKIR

Sugiyono (2007:60), menjelaskan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.”

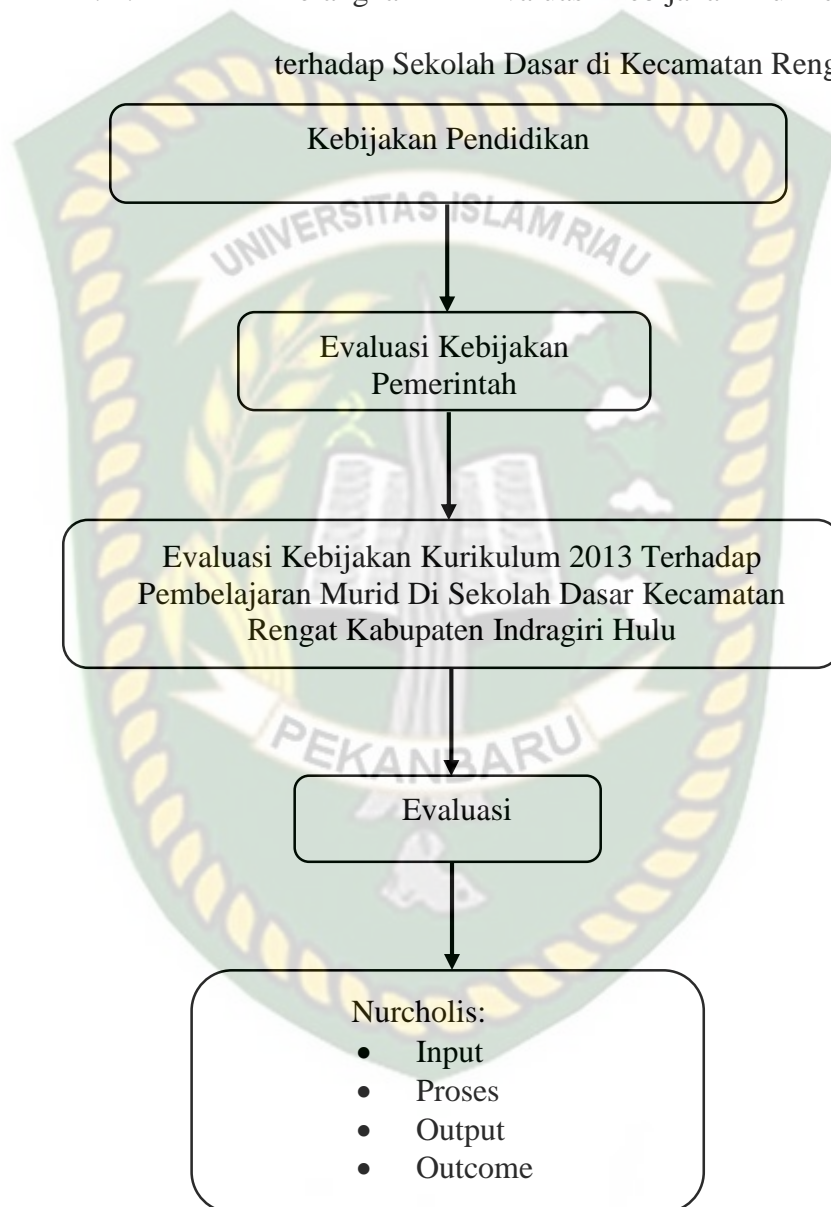
kebijakn publik adalah serangkaian keputusan yang ditetapkan oleh pembuat peratauran atau pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sdang terjadi di masyarakat

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian serta membandingkan kebijakan yang telah berjalan dengan melihat apakah output kebijakan tersebut, sesuai dengan yang telah direncanakan (input) yang nantinya akan menjadi

landasan dalam pembuatan alternative-alternative yang akan dipilih dalam proses menjalankan kebijakan kedepannya.

GAMBAR I.1 : Kerangka Fikir Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 terhadap Sekolah Dasar di Kecamatan Rengat



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020

#### D. KONSEP OPERASIONAL

Konsep Operasional adalah konsep secara jelas mengenai variable-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat (Purwanto, 2007,93)

Dalam penelitian, pemilihan dan penggunaan metode yang digunakan sangat menentukan tingkat kebenaran dan kepercayaan terhadap data yang telah didapat dan dihimpun dalam kegiatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan kurikulum 2013 terhadap Sekolah Dasar di Kecamatan Rengat, menggunakan konsep evaluasi yang dikemukakan oleh Nurcholis, yang dalam proses evaluasi terdapat empat indikator utama yaitu:

- a. *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
- b. *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

Penggunaan konsep evaluasi oleh Nurcholis akan dipadukan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, yang nantinya hasil dari pengumpulan data akan dianalisa sehingga akan diketahui hasil dari evaluasi terhadap kebijakan kurikulum 2013.

#### D. OPERASIONAL VARIABEL

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel juga bertujuan guna menentukan skala pengukuran dari masing masing variabel. Secara rinci, operasional variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1** : Operasional variabel tentang Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013 Terhadap sekolah Dasar di Kecamatan Rengat.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Nurcholis (2007:277), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap <i>input</i> , <i>proses</i> , <i>output</i> , dan <i>outcome</i> dari kebijakan pemerintah daerah.	Variabel Terikat: Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013	Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber daya manusia</li> <li>• Operasional</li> <li>• Sarana dan Prasarana</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>
		Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme</li> <li>• Pelayanan</li> <li>• Efektifitas dan Efisien</li> </ul>
		Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian dengan harapan</li> </ul>
		Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impact</li> </ul>

Nurcholis (2007:277)	Variabel Bebas: Perbedaan Loakasi dan Akreditasi Antar Sekolah		
-------------------------	---	--	--

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020



## **BAB III**

### **TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. TIPE PENELITIAN**

Penggunaan tipe penelitian untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif melalui gambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada, penelitian dibatasi dengan data yang terkumpul dan sampel yang mewakili populasi.

tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian *deskriptif*, menurut Darmadi (2013:6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data atau gejala. Yang dalam hal ini mengenai Dampak Standarisasi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Rengat)

#### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif, menurut Moleong, yang diikuti oleh Haris (2010), metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

#### **C. LOKASI PENELITIAN**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kecamatan Rengat yang berfokus pada seluruh sekolah dasar di kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang memiliki kualifikasi Akreditasi A, dengan alasan sebagai sekolah yang memiliki akreditasi A dianggap mampu dalam menjalankan penerapan kurikulum 2013.

Alasan pengambilan lokasi di Kecamatan Rengat, dikarenakan sebagai wilayah yang pendidikannya paling merata dan sebagai wilayah yang memiliki jumlah sekolah dasar dengan akreditasi A terbanyak se kabupaten Indragiri Hulu.

Serta sebagai pembanding dalam penelitian ini. Juga dilakukan penelitian di Kecamatan Batang Gansal, dengan alasan perbedaan budaya, teknologi, serta pemerataan pendidikan yang berbeda.

#### **D. KEY INFORMAN DAN INFORMAN**

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam ini untuk melihat penerapan kurikulum 2013 di sekolah dasar.

Key informan merupakan informan penting sebagai pemberi informasi utama dalam penelitian. Dalam Penelitian ini, yang berperan sebagai key informan ialah bapak Syafruddin, selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu

**Table 1.5.** Informan

No	Nama	Status
1	A. Muis	Kepala Sekolah Dasar Negeri 019
2	Rokiyah	Kepala Sekolah Dasar Negeri 015
3	Eldamirda	Kepala Sekolah Dasar Negeri 007
4	M. Jumar	Kepala Sekolah Dasar Negeri 001
5	P. Ginting	Kepala Sekolah Dasar Negeri 013
6	Yulita	Kepala Sekolah Dasar Negeri 002

## **E. TEKNIK PENARIKAN SAMPEL**

Teknik pengambilan sampel responden yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto, 2006)

## **F. JENIS DAN SUMBER DATA**

### **1. Data primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu

## **G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik

### **1. Wawancara**

Yaitu suatu cara pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis atau bersifat terbuka adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan mengenai penerapan kurikulum 2013

## 2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek yakni penerapan kurikulum 2013 terhadap siswa sekolah dasar di kecamatan Rengat, sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian.

## H. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>43</sup> Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode analisis data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dengan demikian analisis ini dilakukan saat peneliti berada di lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang telah didapat, lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat.

Menurut Miles dan Huberman, Analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susun tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi.

Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil observasi yang dilakukan. Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus masalah, akan ditempuh dua langkah utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara terpimpin dengan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dan kepala sekolah difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan masalah yang terkandung didalamnya. Bersamaan dengan pemilihan data tersebut, peneliti memburu data baru.
2. Menganalisis data yang terkumpul atau data yang baru diperoleh. Data ini dianalisis dengan membandingkan dengan data-data terdahulu.

Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah sebagai berikut

- a) Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada
- b) Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang memperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku
- c) Melakukan evaluasi atau membuat komparasi

## I. WAKTU PENELITIAN

**Tabel 1.6 :** Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Dampak Standarisasi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Rengat)

N O	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 Bulan/Minggu															
		Jun-jul 2020				Ags- Sep 2020				Okt-Nov 2020				Des 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■	■											
2	Seminar UP								■								
3	Revisi UP								■	■	■	■					
4	Revisi Wawancara									■	■	■					
5	Rekomendasi Survei												■				
6	Survei Lapangan												■				
7	Analisis Data													■			
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■		
9	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■
10	Ujian Komprehensif Skripsi																■
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2020

N O	Jenis Kegiatan	Tahun 2021 Bulan/Minggu															
		Jnr-Feb 2021				Mrt- Aprl 2021				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Wawancara																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Komprehensif Skripsi				■												
11	Revisi Skripsi					■	■	■	■	■	■	■					
12	Penggandaan Skripsi															■	

## BAB IV

### LOKASI PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM KOTA RENGAT

##### 1.1 Sejarah Singkat Kota Rengat

Kecamatan Rengat adalah ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan bagian dari Provinsi Riau, Kota ini berpenduduk sekitar 55.141 (BPS INHU, 2019). Sebelum menjadi Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hulu, dulunya Rengat pernah berdiri kerajaan Indragiri, yang dibuktikan dengan adanya makam dari raja Indragiri, salah satunya ialah raja Narasinga II, yang mana menjadi raja pertama yang menetap di istana Rengat, karena sebelumnya kekuasaan utama masih berada di Malaka.

Rengat juga memiliki masa lalu kelam, pada 5 Januari 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka, dua pesawat Mustang membombardir kota Rengat, dilanjutkan dengan membariskan sekitar warga Rengat di tepian sungai Indragiri, yang nantinya dibunuh dan dibuang ke sungai, dan merubah warna air menjadi warna merah, dengan jumlah korban sekitar 1500 orang, dan salah satunya adalah Teoloes bin Haji Manan, yang saat itu adalah bupati Inhu dan juga ayah dari Chairil Anwar.

Kota Rengat terdiri dari 6 Kelurahan dan 10 Desa

**Tabel 1.7 Kelurahan dan Desa**

No	KELURAHAN	No	DESA
1	Kampung Besar Kota	1	Kampung Pulau
2	Kampung Besar Seberang	2	Kuantan Babu
3	Kampung Dagang	3	Pasir Kemilu
4	Pasar Kota	4	Pulau Gajah

5	Sekip Hilir	5	Rantau Mapesai
6	Sekip Hulu	6	Rawa Bangun
		7	Sungai Beringin
		8	Sungai Guntung Hilir
		9	Sungai Guntung Tengah
		10	Sungai Raya

## 1.2 Luas dan Letak Wilayah Kecamatan Rengat

Luas wilayah kecamatan rengat adalah 1,210.50 Km<sup>2</sup>. Secara umum topografi Kecamatan Rengat adalah berupa dataran dengan ketinggian rata-rata 10m dari permukaan laut. Desa Kuantan Babu menjadi wilayah tertinggi yang berada di atas permukaan laut dengan ketinggian 17m. Sesuai dengan namanya, Desa Rawa Bangun menjadi desa terendah yang berada di atas permukaan laut yaitu 4,9m. Tergolong rendahnya rata-rata ketinggian beberapa daerah di Kecamatan Rengat menjadikan beberapa daerah rawan terkena banjir di musim penghujan. (BPS. INHU).

Dilihat dari posisi mata angin, maka sebelah utara Kecamatan Rengat berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberida. Sebelah Barat Kecamatan Rengat berbatasan dengan kecamatan Rengat Barat, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kuala Cenaku.

**Tabel 1.8 Jarak Kelurahan/Desan Dengan Kantor Camat dan Kantor Bupati**

No	Desa/Kelurahan	Kantor Camat	Kantor Bupati
1	Sungai Guntung Tengah	9.4	18.6
2	Sungai Guntung Hilir	8.1	20.8
3	Kuantan Babu	6.3	17.3
4	Kampung Dagang	1	15.7
5	Kampung Pulau	2.5	18
6	Kampung Besar Kota	0.4	16.2
7	Pasar Kota	0.3	17

8	Sekip Hulu	1.1	17.2
9	Sekip Hilir	1.5	18.5
10	Kampung Besar Seberang	1.8	19.5
11	Rantau Mapesai	3.4	21.5
12	Pasir Kemilu	5	21
13	Sungai Beringin	8	26
14	Pulai Gajah`	8	26
15	Sungai Raya	10	29
16	Rawa Bangun	13	32

### 1.3 Penduk

Penduduk Kecamatan Rengat pada tahun 2019 berjumlah sekitar 55.141, pada akhir tahun 2018 berjumlah 54.162 jiwa, yang terdiri daei 26.818 laki-laki dan 27.344 perempuan dan berasal dari 12.556 rumah tangga. Sehingga jumlah rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Adapun Kecamatan Rengat dihuni oleh beragam enit, seperti melayu, minang, jawa, sunda, batak dan tionghoa.

**Table 1.9 Jumlah Populasi**

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Guntung Tengah	634	618	1252
2	Sungai Guntung Hilir	720	694	1414
3	Kuantan Babu	1868	1894	3762
4	Kampung Dagang	2634	2691	5325
5	Kampung Pulau	1867	1776	3643
6	Kampung Besar Kota	4599	4793	9392
7	Pasar Kota	370	419	789
8	Sekip Hulu	3511	3432	6943
9	Sekip Hilir	2752	3 104	5 856
10	Kampung Besar Seberang	1413	1466	2879
11	Rantau Mapesai	365	398	763
12	Pasir Kemilu	2446	2514	4960
13	Sungai Beringin	2057	2056	4113
14	Pulai Gajah`	248	225	473
15	Sungai Raya	829	812	1641
16	Rawa Bangun	505	452	957
	<b>Jumlah</b>	26818	27344	54162

## **B. GAMBARAN INSTANSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dinas pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terdiri Dari:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b) Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Program

- c. Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal  
Memiliki tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- d) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar  
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- e) Bidang Kebudayaan  
Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan
  - a. Seksi Cagar Budaya dan Museum
  - b. Seksi Sejarah dan Tradisi
  - c. Seksi Kesenian
- f) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan  
Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak

usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan

- a. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- c. Seksi Tenaga Kebudayaan
- g) Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan  
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- h) Kelompok Jabatan Fungsional  
Melaksanakan tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Satuan Pendidikan  
Melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal maupun informal

### **C. GAMBARAN SEKOLAH YANG DITELITI**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga sekolah sebagai sampel dalam melihat dan mengevaluasi bejikan pemerintah yang berupa kurikulum 2013 terhadap sekolah dasar , yaitu Sekolah Dasar Negeri 015 dan Sekolah Dasar Negeri 019 sebgai sampel dari sekolah dengan akreditasi A dan Sekolah Negeri 07 sebgai sampel dari sekolah dengan akreditasi B.

Penulis tidak hanya mengambil dari Kecamatan Rengat saja, namu melihat kondisi pemerataan pendidikan yang masih kurang, perbedaan budaya, serta kemajuan teknologi yang cukup terlihat kesenjangan, maka sebagai studi perbandingan dalam meng evaluasi, penulis juga mengambil sample dari sekolah yang berada di Kecamatan Batang Gansal yaitu, Sekolah Negri 001 dan Sekolah Negri 013 sebagai sample dari Sekolah Berakreditasi A, dan Sekolah Negri 002 sebgai sample dari sekolah berakreditasi B.

### 1.1 Sekolah Dasar Negri 015

**Tabel 1.10 Sekolah Dasar Negri 015**

Nama	:	SD NEGERI 015 KUANTAN BABU
NPSN	:	10493927
Kepala Sekolah		Rokiya
Guru		17
Alamat	:	Jl. Pasir Jaya, Kuantan Babu Km. 04
Kode Pos	:	29351
Desa/Kelurahan	:	Kuantan Babu
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Rengat
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	120
Siswa Perempuan	:	115
Rombongan Belajar	:	11

### 1.2 Sekolah Dasar Negri 019

**Tabel 2.1 Sekolah Dasar Negri 019**

Nama	:	SD NEGERI 019 KAMPUNG DAGANG
NPSN	:	10401722
Kepala Sekolah		A.Muis
Guru		30
Alamat	:	Jl. Sultan Km. 4
Kode Pos	:	29300

Desa/Kelurahan	:	Kampung Dagang
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Rengat
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	199
Siswa Perempuan	:	206
Rombongan Belajar	:	15

### 1.3 Sekolah Dasar Negeri 007

**Tabel 2.2 Sekolah Dasar Negeri 007**

Nama	:	SD NEGERI 007 SEKIP HULU
NPSN	:	10493918
Kepala Sekolah	:	Eldamirda
Guru	:	16
Alamat	:	Jl. Bupati Tulus No. 15
Kode Pos	:	29312
Desa/Kelurahan	:	Sekip Hulu
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Rengat
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	157
Siswa Perempuan	:	158
Rombongan Belajar	:	12

### 1.4 Sekolah Dasar Negeri 001

**Tabel 2.3 Sekolah Dasar Negeri 001**

Nama	:	SD NEGERI 001 SEBERIDA
NPSN	:	10493976
Alamat	:	Jl.Lintas Timur
Kepala Sekolah	:	Muhammad Umar
Guru	:	19
Kode Pos	:	29374
Desa/Kelurahan	:	Seberida

Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Batang Gansal
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Double Shift/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	244
Siswa Perempuan	:	207
Rombongan Belajar	:	16

### 1.5 Sekolah Dasar Negeri 013

**Tabel 2.4 Sekolah Dasar Negeri 013**

Nama	:	SD NEGERI 013 AIR HITAM
NPSN	:	10401658
Alamat	:	Jalan Lintas Samudera Km. 20
Kepala Sekolah	:	Pendapaten Ginting
Guru	:	12
Kode Pos	:	29371
Desa/Kelurahan	:	Talang Lakat
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Batang Gansal
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	128
Siswa Perempuan	:	113
Rombongan Belajar	:	10

### 1.6 Sekolah Dasar Negeri 002

**Tabel 2.5 Sekolah Dasar Negeri 002**

Nama	:	SD NEGERI 002 USUL
NPSN	:	10493977
Kepala Sekolah	:	Yulita
Guru	:	11
Alamat	:	Jl. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
Kode Pos	:	29355
Desa/Kelurahan	:	Usul
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Batang Gansal
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Indragiri Hulu
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau

Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD
Siswa Laki-laki	:	98
Siswa Perempuan	:	101
Rombongan Belajar	:	8



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, identitas informan sangatlah penting, dikarenakan agar pembaca merasa yakin atas informasi yang didapat oleh penulis selama melakukan penelitian, dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan maka hakikatnya, sangatlah penting menjelaskan identitas dari informan.

**Tabel 2.6 Informan**

No	Nama	Jabatan
1	A. Muis	Kepala Sekolah Dasar Negeri 019
2	Rokiyah	Kepala Sekolah Dasar Negeri 015
3	Eldamirda	Kepala Sekolah Dasar Negeri 007
4	Muhammad Jumar	Kepala Sekolah Dasar Negeri 001
5	Pendapaten Ginting	Kepala Sekolah Dasar Negeri 013
6	Yulita	Kepala Sekolah Dasar Negeri 002

#### B. Evaluasi Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap Kebijakan Kurikulum 2013

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai keterangan dan informasi yang didapatkan dari informan yang telah disebutkan diatas mengenai Evaluasi Kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ( Studi Kasus Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu) dengan melakukan wawancara kepada setiap informan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teori yang dikemukakan oleh Nurcholis (2007:277), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap *input*, *proses*, *output*, dan *outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu :

- 1) *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
- 2) *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
- 3) *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- 4) *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

Berikut dijelaskan hasil wawancara serta tanggapan dari informan terhadap indikator – indikator penelitian.

### **1.1 Input**

Berdasarkan teori yang digunakan, indikator yang pertama adalah input dari sebuah kebijakan, seperti persiapan dalam melaksanakannya nanti, perangkat, sarana serta sosialisasi, yang penulis tanyakan pada setiap kepala sekolah.

Menurut A. Muis, selaku kepala Sekolah Dasar Negri 019

*“ untuk persiapan dalam menjalankan kurikulum cukup bagus, melihat kebijakan yang baru ini bertujuan untuk meningkatkan karkter siswa menjadi lebih baik lagi, namun kendala juga selalu ada, bisa dilihat berupa pelatihan*

*yang kurang dari pihak pemerintah, juga buku-buku paket yang sering terlambat datang dari pihak distributor buku, sehingga membuat penerapan masih terlihat kurang maksimal, walaupun itu kendala yang minor sebenarnya, untuk permasalahan ini” (A.Muis, Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 019, 27/11/2020)*

Dilihat dari hasil observasi penulis mengenai kurangnya pelatihan, memang bisa terlihat dengan mudah, terutama di daerah yang cukup jauh dari pusat wilayah pendidikan yang merata, bagaimana penerapan kurikulum yang kurang maksimal, seperti beberapa guru yang masih menggunakan konsep tabularasa, dari pada konsep konstruktivisme, yang mana penggunaan tabulara bertolak belakang dengan yang diinginkan kurikulum 2013, yang mana meminta siswa untuk menjadi kreatif dengan dirinya sendiri, dan sudut pandangny, serta bakat bawaan yang dimiliki.

Permasalahan mengenai pelatihan yang kurang, juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Kurikulum dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.

*“ iya, kita memang punya kekurangan dalam pemberian pelatihan, yang kita dapat hanya pelatihan dari provinsi saja, sedangkan untuk pelatihan yang diberikan oleh Kabupaten sama sekali tidak ada, adapun alasannya, karena tidak adanya dana untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang memang di usung oleh kabupaten, sehingga harapannya, teman-teman yang mengikuti pelatihan langsung dari Provinsi, dapat berbagi ilmu dengan tenaga pengajar yang lain, yang tidak mendapatkan pelatihan” (Syafruddin, Selaku Kepala*

*Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 27/11/2020)*

Hasil observasi yang penulis dapatkan dalam hal ini, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Syafruddin, bahwa pelatihan yang diterima hanya dari provinsi, berdasarkan pada perbincangan diluar wawancara penelitian bersama salah seorang tenaga pendidik, yang mengaku bahwa peroses penggunaan kurikulum 2013 diajarkan kepada tenaga pendidik yang lain di sekolah, yang mana pemateri adalah, tenaga pendidikan yang mengikuti kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Provinsi, sehingga sedikit banyaknya, akan mengalami pengurangan informasi dan ditakutkan menyebabkan kegagalan dalam memahami isi dari yang disampaikan pemateri.

Adapun tanggapan dari bapak Eldamirda selaku Kepala Sekolah Negri 007 mengenai input yang memiliki kemiripan dengan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah Negri 019 dengan tambahan

*“ Ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia, lebih tepatnya tenaga pengajar, terutama guru-guru senior yang masih sulit memahami penggunaan teknologi sekarang ini, mengingat kurikulum 2013 saat ini sangat membutuhkan teknologi dalam pengajarannya, seperti menambah bahan referensi bacaan bagi anak-anak ” (Eldamirda. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 007, 25/11/2020)*

Melihat data observasi yang didapat penulis, pernyataan diatas sangat benar adanya, bagaimana saat penulis mendatangi beberapa sekolah yang terlihat beberapa

tenaga pengajar yang masih bingung dalam menggunakan teknologi yang ada, yang mana saat itu sedang meminta untuk diberi arahan oleh guru yang lebih muda dengan pemahaman teknologi yang lebih baik, tidak jarang juga tenaga pengajar yang enggan untuk belajar, sehingga meminta bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi.

Fenomena ini menjadi penghambat yang cukup besar, yang mana kita tahu bahwa penerapan kurikulum 2013 yang erat dengan penggunaan teknologi sebagai alat bantu ajar dan sumber mencari referensi diluar buku paket yang tersedia.

Jika berpindah ke daerah Kecamatan Batang Gansal sebagai daerah pembading dalam penelitian ini, menurut bapak Pendapatén Ginting selaku Kepala Sekolah Negri 013 mengungkapkan

*“ kalau berbicara soal tujuan dari adanya kurikulum 2013 ini, sudah jelas, agar siswa bisa memiliki karakter yang lebih baik lagi, kreatif, dan inovatif dengan sitem belajar yang cukup berbeda dengan KTSP, karena siswa diminta untuk bisa mandiri, kendala yang muncul adalah, teknologi yang sangat kurang di sekolah ini, baik dari pihak sekolah, maupun pihak siswa, jadi meminta anak untuk mandiri untuk belajar itu cukup sulit, pada masa corona sekarang saja kita tidak bisa belajar online” (P. Ginting. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 013, 30/11/2020)*

Hasil observasi yang penulis lakukan, meberikan data bahwa kondisi yang dialami sekolah didaerah tersebut memang benar adanya, didukung dari pengakuan kepala sekolah, yang kurang lebih 226 peserta didik, hanya sekitar 90 peserta didik

yang bisa digolongkan sebagai pemilik gawai yang sanggup untuk kegiatan belajar daring, pada masa pandemi ini, penulis juga melihat ketika wali murid mengatarkan anaknya ke sekolah untuk pengambilan tugas siswa yang masih banyaknya wali murid masih menggunakan ponsel yang belum tergolong perangkat canggih, yang hanya sebatas penggunaan panggilan suara, dan pesan singkat, sehingga akan mengalami kesulitan dalam proses belajar, terutama pada masa pandemi.

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Ibu Yulita selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 002.

*“cukup sulit jika menggunakan teknologi sebagai langkah utama dalam kegiatan belajar mengajar, mungkin dari tenaga pengajar mumpuni dalam hal pemahaman teknologi, namun tidak dengan siswa dan wali muridnya, ya karena kita tahu bahwa di daerah sekolah berada jaringan komunikasi cukup sulit”*  
(Yulita. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 002, 01/12/2020)

Observasi yang dilakukan penulis saat berada di Sekolah Negeri 002, selain keterbatasan penggunaan teknologi, juga keterbatasan jangkauan jaringan, hal ini dirakan langsung oleh penulis saat mendatangi sekolah tersebut, sehingga walaupun memiliki gawai canggih, namun tetap sulit karena jaringan yang kurang memadai.

Berdasarkan data wawancara dan observasi yang penulis dapatkan pada indikator pertama, menggambarkan bahwa masih banyak kekurangan pada proses input, mulai dari alat penunjang keberhasilan kebijakan, sosialisasi serta pelatihan terkait kebijakan juga masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu peningkatan lagi, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan kondisi yang diinginkan.

## 1.2 Proses

Proses adalah indikator penilaian dalam proses evaluasi yang membahas masa saat kebijakan dijalankan. Menurut pernyataan dari kay informan mengenai proses pada kebijakan penggunaan kurikulum 2013

*“ Untuk proses, yang jelas kita sudah meminta agar setiap sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan kebijakan kurikulum 2013, walau ada yang sudah lama menggunakan secara penuh, dan yang baru menggunakan secara penuh, secara garis besar, proses sudah cukup baik, walau masih ada beberapa yang kurang” ” (Syafuruddin, Selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 27/11/2020)*

Membandingkan pernyataan tersebut dengan observasi yang didapat penulis dilapangan memang benar adanya, bahwa penggunaan kurikulum 2013 sudah diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu, namun mengenai pernyataan bahwa kebijakan sudah dijalankan cukup baik, sedikit berbeda dengan yang didapat oleh penulis dilapangan, seperti jarang nya melakukan literasi yang harusnya di kebijakan kurikulum 2013, siswa wajib membaca buku pada 15 diawal pelajaran, demi meningkatkan kemampuan literasi.

Hal lain yang ditemukan ialah proses belajar mengajar yang harusnya dominan pada murid yang dituntut untuk mandiri dalam belajar, namun kenyataannya masih didominasi oleh guru, sehingga siswa akan lamban dalam mengembangkan diri untuk menjadi lebih mandiri,

Hal lain yang ditemukan penulis dalam melakukan observasi ialah kurangnya waktu yang diberikan tenaga pengajar untuk menimbulkan sikap kritis siswa, sedangkan dalam kebijakan kurikulum 2013, siswa diminta untuk lebih kritis dan mengungkapkan sudut pandangnya terhadap sesuatu.

Adapun pernyataan oleh Ibu Rokiyah selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 015 mengungkapkan

*“ dalam pelaksana kurikulum 2013, terutama perpindahan dari KTSP ke K13, pada proses menjalankannya, sistem TEMATIK yang digunakan saat ini, kadang membuat bingung tenaga pengajar dan juga murid, kadang membuat pelajaran menjadi lebih mudah jika hubungan antar tiap materi pelajaran tidak sukar untuk dipahami ” (Rokiyah. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 015, 27/11/2020)*

Pernyataan diatas, merupakan kendala proses yang dirasakan tenaga pendidik saat menjalankan kurikulum 2013, yang saat tenaga pendidik mengalami masalah dalam penggunaan sistem TEMATIK, maka siswa juga akan mengalami dampak yang sama. Pada indikator proses, observasi yang dilakukan sebelum terjadi wabah COVID 19, pada saat melakukan pra riset, penulis menemukan bahwa siswa kesulitan dalam memahami hubungan antar mata pelajaran, terlihat dari siswa yang menanyakan kembali pemaparan yang disampaikan oleh tenaga pendidik, mengenai hubungan tersebut.

Sama halnya dengan yang dikeluhkan oleh bapak Eldamirda (007) mengenai sistem tematik

*“Dalam hal ini kadang menjadi kendala, seperti yang kita bahas mengenai tenaga pendidik senior yang kadang masih sulit beradaptasi, menyebabkan terhambat dalam kegiatan belajar mengajar, juga saat penilaian saat akhir smester, yang mana saat KBM berlangsung menggunakan tematik, namun saat penilaian berdasarkan materi, yang harusnya jika berpedoman pada sistem K13 harus dinilai setiap hari, yang kembali membuat tenaga pendidik senior dan yang kurang dalam pelatihan menjadi kerepotan”*(Eldamirda. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 007, 25/11/2020)

Namun berbeda bagi Sekolah Negeri 019 yang menjadi sekolah percontohan saat kurikulum 2013 ini mulai diterapkan.

*“Secara umum tidak ada kendala berarti dalam sistem tematik yang digunakan serta proses yang ada saat ini masih berjalan lancar”* (A.Muis, Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 019, 27/11/2020)

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, yang dikatan oleh bapak A.Muis benar adanya, data ini didapat penulis saat berkunjung di sekolah tersebut, yang terjadi perbincangan terhadap tenaga pengajar, dan berdasarkan pada pengakuan dalam obrolan tersebut, bahwa memang ada sedikit masalah diawal, namun sudah tidak menjadi masalah lagi, dikarenakan sudah banyak tenaga pengajar yang memahami cara penggunaan dari sistem TEMATIK dan bagaimana guru untuk ingat pada penilaian masing masing murid di tiap Tema yang digunakan.

Pada sekolah pembanding di kecamatan Batang Gansal menurut bapak Muhammad Jumar selaku Kepala Sekolah Negeri 001 mengungkapkan

*“kegiatan yang ada saat ini, terutama penggunaan tematik sebagai sarana belajar tidak begitu berarti dalam masalah yang ada, walau di awal ada ketidaksempurnaan dan kemudian mengalami perubahan lagi pada kurikulum 2013, hanya jika dilihat secara seksama, pada saat KBM, penggunaan teknologi yang masih belum maksimal” (M.Jumar. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 001, 30/11/2020)*

Berbeda dengan lokasi penelitian yang pertama, bahwa dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum 2013, penggunaan tematik memang sebuah masalah pada awalnya, tapi yang lebih bermasalah adalah teknologi yang masih kurang mendukung dalam hal ini, observasi yang didapat penulis, bisa mengatakan bahwa penggunaan teknologi memang masih kurang, pemahaman anak-anak dalam dunia teknologi juga masih kurang.

pada kegiatan belajar, jarang sekali menggunakan teknologi yang ada, bahkan dalam kondisi yang sedang pandemi dan kegiatan belajar yang dilakukan dirumah, siswa tidak bisa melakukan secara daring, sehingga wali murid akan datang kesekolah untuk mengambil materi pelajaran juga tugas pada hari yang ditentukan, dan dikembalikan lagi pada hari berikutnya, sehingga pelajaran tidak menggunakan teknologi, namun masih manual, dapun yang penulis lihat, masalahnya tetap pada masih kurangnya penggunaan teknologi, jikalau ada, namun teknologi yang digunakan masih belum mamapu untuk membatu pelajaran siswa.

Menurut pendapat bapak Ginting mengenai proses pelaksanaan ini

*“berjalan cukup normal bagi saya, namun masih kurang efektif, dikarenakan kendala yang ada, serta menurut saya, ya seperti teknologi, pada awal penerapan di tahun 2014, pada awal sekali, dimulai dengan mencari materi di internet, namu teknologi masih kurang, namun berjalannya waktu, mulai membaik, namu jauh dari yang diharapkan, proses ini juga terkandala dari tematik yang memaksa untuk memperluas wawasan dari tenaga pendidiki, karna saat di perintahkan untuk cari lah, maka kita diminta untuk mencari diluar dari pedoman yang diberikan, seperti buku lain dan internet” (P. Ginting. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 013, 30/11/2020)*

Masih sama dengan Sekolah Dasar Negri 001, bahwa teknologi masih menjadi hambatan yang cukup berarti, namu observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan ada perbedaan antara Sekolah Dasar Negri 001 dengan Sekolah Dasar Negri 013. Yang mana SDN 001 yang terkendala dalam hal teknologi, hanya sebatas penggunaan yang msih kurang dalam hal tersebut, terutama penggunaan gawai yang sudah canggih, namu pada wilayah SDN 013, ada masalah tamabahan, yaitu jaringan teknologi yang masih sangat kurang, peneliti merasakan sendiri betapa sulitnya jaringan telekomunikasi di walayah tersebut, kondisi jaringan yang masih sulit, terutama pada provider jaringan seluler yang tidak umum, bahkan untuk menerima panggilan saja masih cukup sulit.

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa di kecamatan Rengat, yang sebagai daerah dengan pendidikan yang paling merata di Kabupaten Indragiri Hulu tidak mengalami permasalahan yang cukup berarti dalam prosesnya, walau ada

kendala dalam sistem belajar tematik yang dirasa kadang suka membingungkan, namun hal ini tidak berlaku pada sekolah percontohan, yaitu sekolah Dasar Negeri 019, berdasarkan pada pernyataan dari kepala sekolahnya, penulis menganggap sekolah tersebut sudah mulai bisa beradaptasi pada perubahan yang terjadi saat ini yang serta didukung oleh teknologi yang memadai.

Namun lain hal jika dibandingkan dengan kecamatan Batang Gansal, kecamatan yang berada diujung kabupaten, memang jika dilihat Sekolah Dasar Negeri 001 tidak begitu terkendala oleh teknologi, karena setidaknya berdasarkan observasi penulis bahwa wilayah sekitar sekolah yang berada di tengah kecamatan memiliki jaringan komunikasi yang baik, walaupun tidak semua siswa dan wali murid memiliki perangkat elektronik seperti smartphone.

Berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri 013 dan sekolah Dasar Negeri 002 yang berdasarkan hasil observasi penulis, jaringan komunikasi masih kurang mendukung di wilayah tersebut, apa lagi yang memiliki smartphone sebagai alat bantu belajar, sangat jauh dari kata cukup jika dijadikan sebagai penunjang kegiatan belajar, apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi dapat disimpulkan pada indikator ini, walau sekolah memiliki akreditasi yang sama, namun dengan kondisi pendukung yang berbeda, maka akan sulit untuk penerapan kurikulum dalam prosesnya menjadi lancar.

Saat membahas Sistem Tematik yang diberikan oleh kurikulum 2013, penulis mencoba menawarkan prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Arthur W. Combs tentang pendidikan yang humanis, dimana siswa dapat memilih apa yang dia inginkan tanpa harus belajar materi yang lain,

*“ kita sedang dalam proses merdeka belajar, pada kurikulum sekarang, namu tetap, tidak membuat siswa unuk meninggalkan mata pelajaran lain, hanya tuntutan yang dikurangi, agar siswa bisa fokus pada keinginannya, namu itu masih cukup jauh dari perkiraan” (Syafruddin, Selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 27/11/2020)*

Penulis berusaha menemukan fakta dilapanagan, berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis, seperti pada indikator input, bahwa kita masih kurang dalam banyak hal, seperti pemerataan teknologi, kesiapa guru, kesiapan dana dari pemerintah untuk bisa melakukan pelatihan, serta pendidikan sebelum usia sekolah dari wali murid yang masih belum mendukung untuk mencapai merdeka belajar.

*“ Saya sangat setuju untuk hal yang satu ini, namu untuk sekarang akan sulit, karna kita kurang sarana yang cukup unuk menunjang ide tersebut, tapi mungkin suatu saat akan bisa dilakukan, namun saat ini yang bisa kita lakukan hanya mengikuti arahan dari pemerintah, tentang arah kita harus seperti apa” (Eldamirda. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 007, 25/11/2020)*

Ide yang disampaikan oleh penulis kepada sekolah di Kecamatan Batang Gansal juga mendapat respon yang sama dengan pernyataan sebelumnya, namu Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh ibuk Rokiyah terhadap ide penulis

*“ Anak itu seperti kertas putih yang bersih, kita bisa menulis apa yang kita mau pada kertas tersebut, kita bisa membuat anak itu menjadi apa dimasa depan, semua tergantung pada tinta yang digoreskan oleh guru” (Rokiyah. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 015, 27/11/2020)*

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu Rokiyah, berbeda dengan prinsip kurikulum 2013, yang mana dalam kurikulum, anak tidak lagi menjadi kertas putih, dan hanya menerima perubahan dan arahan yang disampaikan oleh guru, namu di kurikulum 2013, anak diminta untuk memutuskan sendiri pehamannya, yang di ikuti oleh guru sebagai pembimbing anak tersebut, sehingga anak akan memiliki keragaman antar mereka, tidak lagi sama seperti pahaman yang lalu.

### 1.3 Output

Pada indikator evaluasi yang ketiga ini yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

*“Kita lihat dari apakah menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan awal, tujuan awalnya memperbaiki karakter siswa menjadi lebih baik, dengan siswa berkemampuan berfikir kritis, inovatif, dan kreatif. Tentu mengarah kesitu, bisa dilihat dari apa yang diberikan, anak diminta perbanyak literasi, dan dilatih agar kreatif, guru juga sudah diminta unutk tidak dominan dalam pembelajaran, jadi saya rasa sudah tepat sasaran.” ” (Syafruddin, Selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 27/11/2020)*

Melihat pada hasil observasi yang didapat penulis, sesuai dengan apa yang diungkapkan, dengan sekolah- sekolah berusaha menerapkan sebaik mungkin demi

tujuan yang diinginkan, juga di dukung dengan pernyataan dari narasumber lain dalam penelitian ini.

*“ Tujuan dari kurikulum itu sendiri sudah sangat jelas, yaitu mengubah karakter siswa menjadi lebih baik dengan memperbaiki sikap dan sifat, serta kreatif dan inovatif, sudah sangat tepat sasaran jika melihat dulu siswa di Indonesia mengalami penurunan karakter, dan kehilangan budaya timur yang kuat akan sopan dan santun “(Eldamirda. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 007, 25/11/2020)*

Jika dilihat dari ruang lingkup yang lebih kecil, seperti kawasan lingkungan sekolah, dari observasi penulis, terlihat bahwa anak memang membutuhkan pendidikan karakter, penulis menukan dalam observasi, anak yang masih malu-malu dalam bertanya, dan masih sulit untk mengekspresikan dirinya, sehingga anak sangat membutuhkan kuriukulum 2013, pun dengan hasil yang dilahat oleh penulis, sudah mulaibanyak siswa yang mulai bisa menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan, menunjukkan antusiasmenya, bagaimana anak mulai bisa belajar dengan penerapan pendidikan yang dominan dilakukan oleh siswa.

Begitu yang disampaikan oleh bapak Eldamirda kepada penulis mengenai output dari kurikulum tersebut ditambah dengan pernyataan dari bapak A. Muis

*“ bahwa dalam perubahan karakter siswa itu, ada tiga kelompok penting yang berperan sangat besar dan tidak bisa dipisahkan yaitu, Sekolah, keluarga, dan lingkungan di masyarakat” “ (A.Muis, Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 019, 27/11/2020)*

Begitupun yang disampaikan oleh Kepala sekolah di kecamatan Batang Gansal. Dari hasil observasi penulis pada saat melakukan penelitian di tiap-tiap sekolah dapat melihat antusiasme dari tiap-tiap murid yang kebetulan sempat bertemu walau dalam keadaan pandemi.

#### 1.4 Outcome

Sebagai indikator terakhir dari evaluasi, *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

*“ Hasilnya baik, sudah sesuai dengan tujuan awal, bisa kita lihat di sekolah sekolah, terutama disekolah percontohan ” ” (Syafruddin, Selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, 27/11/2020)*

Dari observasi yang didapat penulis, benar adanya jika hasil yang terlihat cukup baik ada pada sekolah percontohan, dari 6 sekolah yang diteliti oleh penulis, ada satu sekolah percontohan, yaitu Sekolah Dasar Negeri 015 Rengat, disekolah tersebut memang terlihat lebih unggul dari pada beberapa sekolah yang lain, bukan berarti sekolah lain tidak menimbulkan hasil yang baik, hanya saja masih belum maksimal dari hasil yang didapat, tentu saja karena beberapa kendala yang terjadi.

Disampaikan oleh bapak A.muis kepada penulis.

*“ Tentu berubah, mulai terlihat karakter yang baik dari siswa-siswa sekolah, karena memang ditekankan pada itu dan menjadi fokus utama, yang ditunjang*

*dengan cara mendidik dalam pelajaran yang diperbarui, dengan tujuan agar siswa bisa mandiri dalam belajar. Perubahan ini juga dipengaruhi dari tiga faktor utama yang saya sebut diawal, sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Tigah ini tidak bisa dipisah,. Kami dari pihak sekolah sudah melakukan semaksimal mungkin“ (A.Muis, Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 019, 27/11/2020)*

Berdasarkan faktor yang disebut oleh informan diatas, mengenai faktor utama, penulis melakukan observasi terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekita. Melihat pada lingkungan keluarga, berdasrkan pengakuan salah seorang guru di Sekolah Dasar negri 019 bahwa rata-rata orang tua murid itu berkerja sebagai pegawai baik pemerintahan, maupun swasta, sehingga berakibat pada kurangnya waktu interaksi anak dengan orang tua, sehingga kadang anak kurang bisa terpantau dengan baik, apalagi di daerah kecamatan Rengat yang pemerataan teknologi yang cukup bagus sehingga hampir tiap anak yang masih berada dibawah umur sudah menggunakan smartphone tanpa pengawasan orang tua.

Dari hasil temuan penulis mengenai fenomena yang terjadi terkait dari moral anak indonesia yang masih kurang, yang dapat dilihat dari data anak behadapan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih terbilang tinggi, melihat fenomena ini, dekemukakan oleh bapak Eldamirda

*“ kalau kita lihat kasus yang ada saat ini, apalagi yang dulu pernah terjadi perkelahian antara kepala sekolah dengan siswa, kalau menurut saya, ya pasti ada sebab dibalik itu, guru itu bagaikan orang tua, kalau anaknya berbuat*

*salah, kita sebagai orang tua yang harus mawas diri, namu kalau kembali ke sekolah dasar, untuk sekarang belum ada kasus, namu siswa hasil didikan kurikulum K13 ini sudah menunjukkan perubahan yang cukup, dimana siswa sudah mulai bisa terbuka untuk berdiskusi dan bertanya tentang materi yang kurang dipahami kepada gurunya” (Eldamirda. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 007, 25/11/2020)*

Dari hasil temuan penulis, sangat jarang menemukan guru yang mau mengakui kesalahan yang dibuatnya, dari perbincangan yang dalukan dengan tenaga pendidikan di beberapa sekolah, terlihat bahwa tiap perbincangan sepakat, bahwa masih enggan untuk mengakui kesalah jika diberikan pertanyaan mengenai siapa yang perlu disalahkan jika anak melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan situasi lempar tanggung jawab, dari masing masing penentu karakter, antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Pada wilayah kecamatan Batang Gansal yang peneliti gunakan sebagai pembedning mendapatkan hasil berupa

*“ jika berbicara soal karakter, berubah, namu tidak begitu signifikan, yang terlihat berubah jelas cara mengajar dari guru itu sendiri, kalau harus mengatakan apakah kurikulum saat ini sudah berjalan baik, jelas msih belum, kalau melihat tujuan awalnya dalam memperbaiki karakter, sudah terlihat perubahan tentunya, namun dengan kendala-kendala yang ada serta fenomena yang telah disebutkan ” (P. Ginting. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negri 013, 30/11/2020)*

Penulis mendapat fakta bahwa yang disampaikan informan adalah benar, bahwa perubahan terjadi pada tenaga pengajar dan siswa, melihat tenaga pengajar yang mulai mengajar dengan prinsip pembimbing, tidak lagi sebagai pemberi materi utama, dan anak yang mulai berubah karakternya, bisa dilihat rasa hormat yang muncul dari anak tanpa paksaan, bahkan kepada penulis yang datang hari itu saat melakukan penelitian.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yulita bahwa

*“ Jelas ada perubahan, dibantu dengan kerjasama dengan orang tua, kita memang memiliki kelemahan dalam bidang teknologi, tidak seperti sekolah-sekolah yang ada di kota, namu waktu yang dihabiskan oleh anak dengan orang tuanya cukup banyak, yang mendapatkan pelajaran sikap serta pelajaran hidup membuat karakter anak dilingkungan pedesaan cenderung lebih kuat, namu harus kita tahu bahwa lingkungan masyarakat juga berpengaruh, sidikit sulit dalam mengontrol anak, namun dengan faktor sekolah dan orang tua yang cukup baik, harapan saya bisa menjaga anak dari kerasnya pengaruh lingkungan masyarakat “ (Yulita. Selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 002, 01/12/2020)*

Pada bagian outcome dalam evaluasi ini, penulis bisa menyimpulkan bahwa tujuan dalam merubah karakter siswa sudah tercapai, anak-anak juga mulai aktif dalam belajar, serta kreatif dalam mencari materi pelajaran melalui internet, walau beberapa daerah kurang dalam teknologi. Namun tentu dengan ketidak sempurnaan, saat dilihat dari data fenomena yang didapat. Dengan mebandingkan kedua daerah dengan latar

belakang budaya dan teknologi yang berbeda, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah kebijakan dikarenakan banyaknya perbedaan serta kendala yang terjadi.

### **C. Data Observasi Mengenai Evaluasi Kebijakan Kurikulum 2013**

Adapun hasil observasi yang didapat peneliti berdasarkan teori evaluasi terhadap penerapan kurikulum 2013 terhadap 3 sekolah di 2 daerah yang berbeda.

#### **1.1 Input**

Membahas tentang sumberdaya manusia, sarana atau prasarana, dan sosialisasi kebijakan. pada observasi yang penulis lakukan, jika melihat pada daerah Kecamatan Rengat, tidak memiliki masalah yang berarti yang dapat dilihat dari teknologi yang memadai seperti jaringan komunikasi, fasilitas penunjang pendidikan seperti komputer, serta tenaga pendidik yang baik, walau kelengkapan dari tiap tiap sekolah di Kecamatan Rengat berbeda, namun dirasa cukup dalam menunjang kegiatan belajar pada penerapan kurikulum 2013, berbeda pada sekolah yang berada pada Kecamatan Batang Gansal, seperti buku referensi diluar bantuan pemerintah, kondisi jaringan komunikasi yang sulit, terutama di daerah sekitar Sekolah Dasar Negeri 013 dan 002, yang mana akan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar.

#### **1.2 Proses**

Proses yang dilakukan pada daerah Kecamatan Rengat serta Kecamatan Batang Gansal, dalam observasi penulis berjalan cukup lancar, namun dengan beberapa catatan yang besar, namun dengan masalah masing-masing sesuai dengan kendala pada point input. seperti penambahan pojok bacaan yang dianjurkan dalam kurikulum 2013, yang

nanti dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, siswa bisa meningkatkan literasinya, sehingga proses penerapan lebih baik lagi.

### **1.3 Output**

Point yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, yang dalam hal ini penulis melihat bahwa pada lingkungan sekolah, terjadi peningkatan moral karakter siswa, baik pada teman satu sekolahnya, atau dengan guru yang berada disekolah, namu ada hal menarik yang penulis temukan dalam observasi yang dilakukan di dua daerah yang berbeda, yaitu sikap anak terhadap orang asing, yang dialami oleh penulis, bagaimana siswa Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Rengat hampir tidak tersenyum dan bertegur sapa pada orang asing dilingkungan sekolah, baik saat sedang sendirian, maupun sedang bersama orang tua, berbeda dengan siswa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Batang Gansal, yang sedikit banyaknya, tetap tersenyum dan bertegur sapa kepada orang asing dilingkungan sekolah.

Dapat dipahami oleh penulis pada keadaan tersebut, yang bisa dianggap sebagai bentuk waspada diri dan perlindungan diri yang mungkin diajarkan oleh orang tua atau mungkin tenaga pendidik di sekolah, melihat kondisi daerah yang berbeda antar Ibu Kota Kabupaten, dengan wilayah Kecamatan di ujung Kabupaten.

### **1.4 Outcome**

Secara umum, dapat dilihat pada anak yang mengalami peningkatan karakter, keratif dalam belajar, serta inovatif dengan menggunakan internet sebagai sarana belajar dan memperluas referensi, hanya saja, tidak semua anak mampu memiliki alat yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tersebut.

Ada hal menarik dalam perepan kurikulum ini, dimana terjadi penyalahgunaan teknologi, saat melakukan observasi terhadap anak-anak yang berada dilingkungan wilayah penelitian, ditemukan sekelompok anak yang asik menggunakan telephone genggamnya, yang saat ditanya mengenai kegiatan yang sedang dilakukan, didapati alasan untuk belajar, namun saat dilihat sekilas, terdapat aplikasi yang menggunakan batasan umur dalam penggunaannya, yang saat ditanya milik siapa telephone genggam tersebut, dengan yakin mereka mengatakan bahwa itu milik pribadi mereka.

Dari sini kita tahu bahwa keharusan menggunakan teknologi dalam belajar, juga memerlukan bimbingan yang ketat dari pihak sekolah dan keluarga, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan teknologi oleh anak-anak.

#### **D. Hambatan Dalam Penerapan Kurikulum 2013**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan kurikulum 2013, yaitu:

##### **1. Kurangnya Pelatihan Guru**

Pada hambatan pertama, terjadi pada semua sekolah yang diteliti dan dua daerah yang berbeda, berdasarkan keterangan yang didapat, bahwa pelatihan memang sangat kurang, bisa dilihat dari sedikitnya tenaga pendidikan yang mendapatkan pelatihan, dan tenaga pendidik yang tidak mendapat pelatihan langsung, sehingga yang mendapatkan pelatihan, berkewajiban untuk memberi pelatihan mandiri pada tenaga pendidik lain, yang peneliti rasa kurang efektif, karena akan ada pengurangan pemahaman antara pemateri langsung dari pemerintah dengan pemateri dalam pelatihan mandiri.

Adapun alasannya dikarenakan anggaran dana kabupaten yang kurang memadai dalam melakukan pelatihan, sehingga pelatihan hanya dilaksanakan ditingkat Provinsi, sehingga tidak banyak tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan langsung oleh pemateri utama. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa keterbatasan dana menjadi kendala dalam memberikan pelatihan, yang berakibat pada kurangnya pelatihan guru pada tingkat Kabupaten

## 2. Lambatnya Adaptasi Guru

Dalam hal ini, tidak terjadi di semua sekolah yang diteliti, namun ada di tiap daerah, seperti Sekolah Dasar Negeri 007 di Kecamatan Rengat, dan Sekolah Dasar Negeri 013 di Kecamatan Batang Gansal, yang biasanya terjadi karena faktor usia dari tenaga pendidik, faktor usia yang sudah berumur membuat tenaga pendidik tertanam akan paham kurikulum yang sebelumnya, sehingga kadang merasa aneh dengan adanya pembaharuan yang mengakibatkan sulit menerima perubahan dengan sebab kebiasaan.

Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh bapak Eldamirda selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 007, bahwa guru yang sulit beradaptasi terhadap perkembangan menjadi salah satu penghambatan, baik dalam faktor usia, yang terlambat melek teknologi, atau sudut pandang tersendiri terhadap pendidikan yang menjadikan para guru yang tergolong senior dengan usia lanjut, sulit mengubah kebiasaan, maupun pola pikir.

### 3. Sistem Tematik

Dalam sistem belajar tematik, kadang guru mengalami kesulitan, tidak terjadi di semua sekolah yang diteliti, tapi ada di setiap daerah yang diteliti. Adapun sebab dari hambatan ini adalah karena kurangnya pelatihan dan memang sistem itu sendiri yang memang dikeluhkan, seperti bagaimana guru harus memisah penilaian pada satu tematik yang terdiri dari beberapa materi yang dalam pengajarannya menjadi satu.

Berdasarkan pada pernyataan bapak Pendapaten Ginting selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 013, bahwa masih banyak guru yang kadang kesulitan dalam penggunaan sistem tematik, seperti dalam sistem penilaian yang kadang membuat guru kesulitan, yang mana tiap anak memiliki nilai masing masing, namun harus diambil langsung saat pembelajaran dimulai, pada saat kegiatan berlangsung, materi yang diajarkan adalah penggabungan beberapa tema, sedang pada saat penilaian, memiliki nilai materi yang terpisah.

### 4. Pemerataan Teknologi

Pada hambatan ini hanya terjadi pada daerah Kecamatan Batang Gansal, yang disebabkan karena memang teknologi yang masih kurang di daerah tersebut, seperti kepemilikan gawai canggih yang dapat digunakan untuk belajar, dan jaringan telekomunikasi masih kurang. Dengan hambatan ini, keinginan kurikulum 2013 dalam meningkatkan literasi siswa disekolah dengan banyak membaca dan mendapat referensi lain selain buku paket yang didapat menjadi terkendala karena teknologi yang masih sulit.

Berdasarkan pada pernyataan Ibu Yulita selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 bahwa daerah yang cukup jauh dari pusat kecamatan menjadi faktor utama bagaimana teknologi sulit didapat, apalagi kondisi masing masing kepala keluarga yang masih banyak sulit untuk memenuhi kebutuhan teknologi bagi anak saat berada dirumah, bahkan saat kegiatan masih tetap terganggu dikarenakan jaring komunikasi yang masih sulit didapat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dapat penulis simpulkan bahwa jika kita hanya melihat pada apakah karakter anak sudah berubah dari pada saat masa kurikulum sebelumnya, tentu berdasarkan pada hasil wawancara, penulis dapat menyatakan bahwa karakter anak sudah berubah, namun tetap tidak bisa tutup mata pada hal-hal lain yang masih menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan dari kurikulum ini, seperti adanya fakta bahwa tingka anak berhadapan hukum yang masih tinggi, serta prinsip pendidikan demokratis yang sampai sekarang masih sulit untuk diwujudkan, yaitu salah satu contoh besarnya adalah pemerataan pendidikan, seperti alat penunjang KBM disekolah, contoh komputer, atau menyediakan jaringan telekomunikasi di sekolah, karena dapat dilihat di wilayah pembanding dari penelitian ini yang memberikan fakta pada kita bahwa teknologi yang menjadi penunjang utama dari kurikulum yang ada saat ini malah menjadi penghalang, walaupun sudah terbantu dengan adanya buku-buku yang digunakan oleh siswa sebagai bahan referensi, yang saat ini rata-rata sekolah telah memiliki 1 buku satu anak, namu peluasan dari pencarian referesnsi akan tetap sulit, dan jjiika kita lihat kondisi saat ini yaitu pandemi yang masih kita rasakan, membuat kebutuhan akan teknologi meningkat. Tidak hanya itu, berdasarkan pada faktor yang paling berpengaruh dalam perubahan karakter anak yang saat ini sulit dikendalikan adalah lingkungan

masyarakat, yang kadang acuh tak acuh, yang mulai apatis akan akan kondisi moral anak

Ditemukan beberapa kendala dalam penerapan kurikulum 2013 seperti buku yang terlambat, pelatihan terhadap tenaga pengajar yang kurang, serta teknologi yang jauh dari kesempurnaan, yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kurikulum yang digunakan saat ini.

### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah disebutkan diatas mengenai Evaluasi Kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ialah:

1. Memerbanyak pelatihan terhadap tenaga pengajar dalam meningkatkan kemampuan dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013
2. Mempercepat pemerataan pendidikan ditiap tiap-tiap daerah
3. Meminta agar masyarakat sebagai bagian dari pembentuk karakter anak agar tidak apatis terhadap apa yang dilakukan, dilihat, dipelajari anak dalam pergaulannya di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. " *Analisis Kebijakan Negara Edisi Kedua*". Bumi Aksara. Jakarta
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Penerbit Aswaja Pressindo.
- Abdullah Sani, Ridwan. 2019. *Strategi Belajar Mengajar*. Depok: Rajawali Pers.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bugin & Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Calongesi, J. S 1995. *Merancang Tes Untuk Menilai Prestasi Siswa*. Bandung: ITB
- Djohan, Djohermansyah, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal (Cet.Pertama)*, Jakarta, Bumi Aksara,1990
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily (1983). *Kamus Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. XII
- Iman, Muis Sad, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah Dan Progressivisme John Dewey*, Yogyakarta: Safiria Insani Press Bekerjasama Dengan MSI UII, 2004.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumano, Y. 2001. *Assessment and Portofolio Assessment-Its Theory and Practice*. Japan Shizuoka University
- Leo, Agustino, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Maulidiah, Sri, 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung: Indra Prahasta
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mulyasa, E. 2013, “*Pengembangan dan Implementasi Pemikiran Kurikulum*”. Rosdakarya. Bandung
- Munaf, Yusri. 2016 “*Hukum Administrasi Negara*” Marpoyan7, Pekanbaru.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. “*Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*”. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Robert E. Slavin. 2000. “*Education Psychology: Theory and Practice*”. Pearson Education. New Jersey.
- Sakinah Nadir, 2013, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No. 1 Edisi Januari, Makassar, UIN Alauddi
- Sarkim, T., (1998). “*Humaniora Dalam Pendidikan Sains*”. Dalam Sumanji dkk: *Pendidikan Sains Yang Humanistis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Sanjaya, Wina. (2008). *Perencanaan dan desain sistem pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Stuffelbeam, D.L *et al.* 1971. *Education Evaluation and Decision Making*. Fourt Printing. Illinois: F.E Peacock Publisher, Inc
- Sri Rumini, dkk. 1993. “*Psikologi Pendidikan*”. UPP, UNY. Yogyakarta
- Syafiie, Kencana Inu, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Zainul, A & Nasoetion. 1997. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta. Dirjen Dikti

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. MNC

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### **Jurnal:**

Abduh, M, Nugroho, & Iskandar. 2014. “*Evaluasi Pembelajaran Tematik Dilihat Dari Hasil Belajar Siswa*”. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational TechNology Studies*, Vol. 4, No.1

Rifai, Achmad Hafidz. 2018 “*Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen*.” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Crippen, C. (2005). “*The democratic school: First to serve, Then to lead.*” *Cardian Jurnal Ecuvation Administration and Policy*. Universitas Of Manitoba. [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com). 02-01-2020

Fikri, Rijalul. 2017. “*Kuasa Negara dan Keijakan Pendidikan Kewirausahaan (Analisis Wacana Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Indonesia)*.” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sinaga, Bornok. 2012. ” *Pendidikan dan Pembelajaran Yang Demokratais dan Humanis*”. Vol 5, No 2. [unimed.ac.id](http://unimed.ac.id). 02-01-2020.

Sakinah Nadir, 2013, “*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 1 No. 1 Edisi Januari, Makassar, UIN Alauddi

Nahar, Novi Irawan. 2016. “*Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran*”. Vol 1, No 1. [um-tapsel.ac.id](http://um-tapsel.ac.id). 02-02-2020.

Cahya, Alif Setiadi. 1430 Hijriah (2009). “*Konsep Pendidikan Demokrasi Menurut Jhon Dewey*” *At-Ta'dib* Vol. 5. No. 1.

### **Dokumentasi:**

Undang -undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Permendikbud No. 69 Tahun 2013



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

#### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 387 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Iqbal  
NPM : 167310550  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus  
Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Siswa Sekolah Dasar  
Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu)  
Persentase Plagiasi : 21 %  
Jumlah Halaman : **67 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
**NPK. 970702230**